



**PENURUNAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
PADA PEMILU 1999 DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan  
Pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) pada  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh:

**Imam Mulyadi**

970910101106

Pembimbing :

**Drs. Nuruddin M. Yasin**

**NIP. 130 518 486**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2002**

Asa	Hadiah	Klass
	<del>Pembelian</del>	324.658
Tarima Tol	26 AUG 2002	MUL
No. Induk	1471	P
KLASIR/ E YASIN	SRS	

S  
e-1

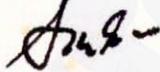
PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan  
Dihadapan Panitia Penguji Skripsi  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juni 2002  
Jam : 10.00 WIB.

Panitia Penguji

Ketua



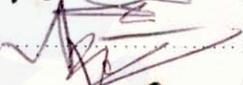
(Drs. Sjoekron Sjah, SU)

Sekretaris



(Drs. H. Nuruddin M. Yasin)

Anggota :

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU (..........)
2. Drs. Nuruddin M. Yasin (..........)
3. Drs. A. Habibullah, Msi (..........)
4. Drs. A. Eby Hara, MA, PhD (..........)

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130624032

**Lembar Pernyataan**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui



Imam Mulyadi

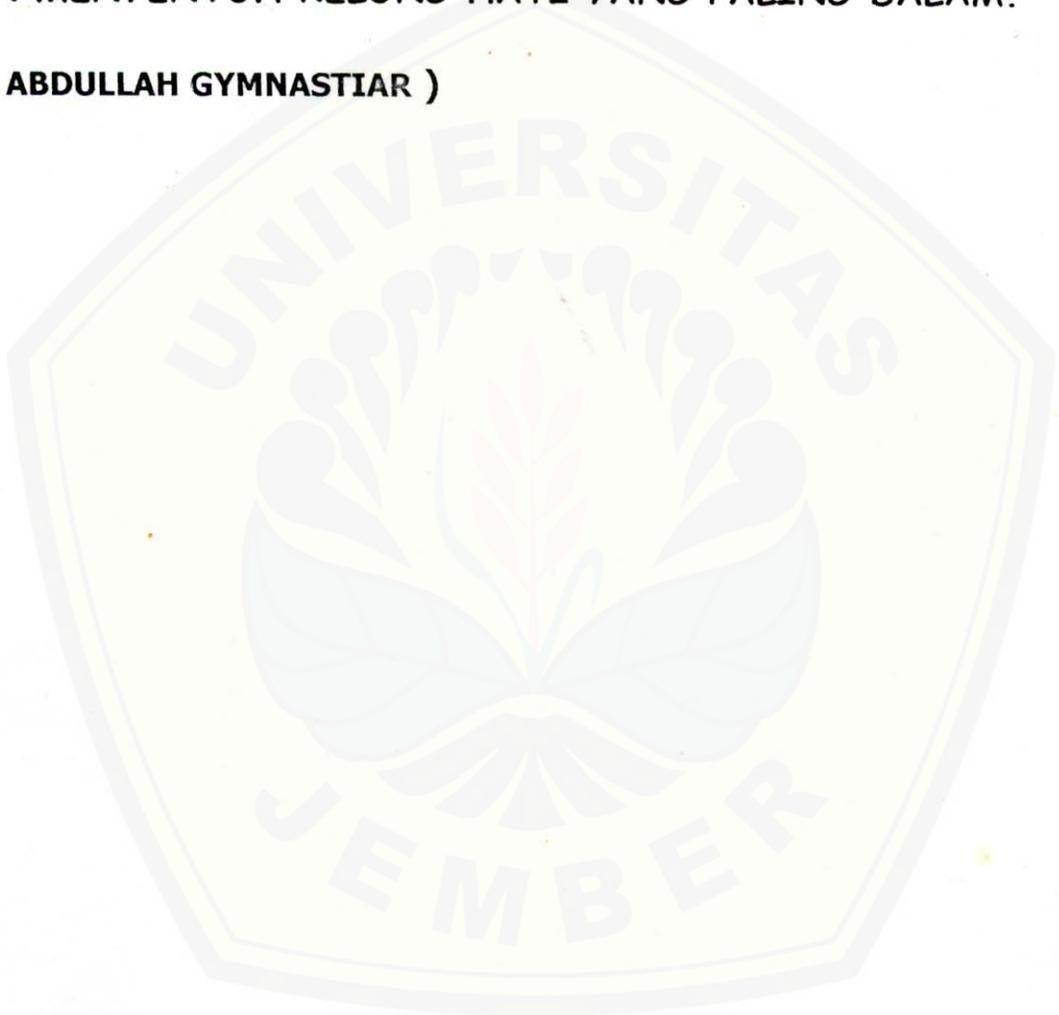
[Nim: 97 0910101106]



MOTTO

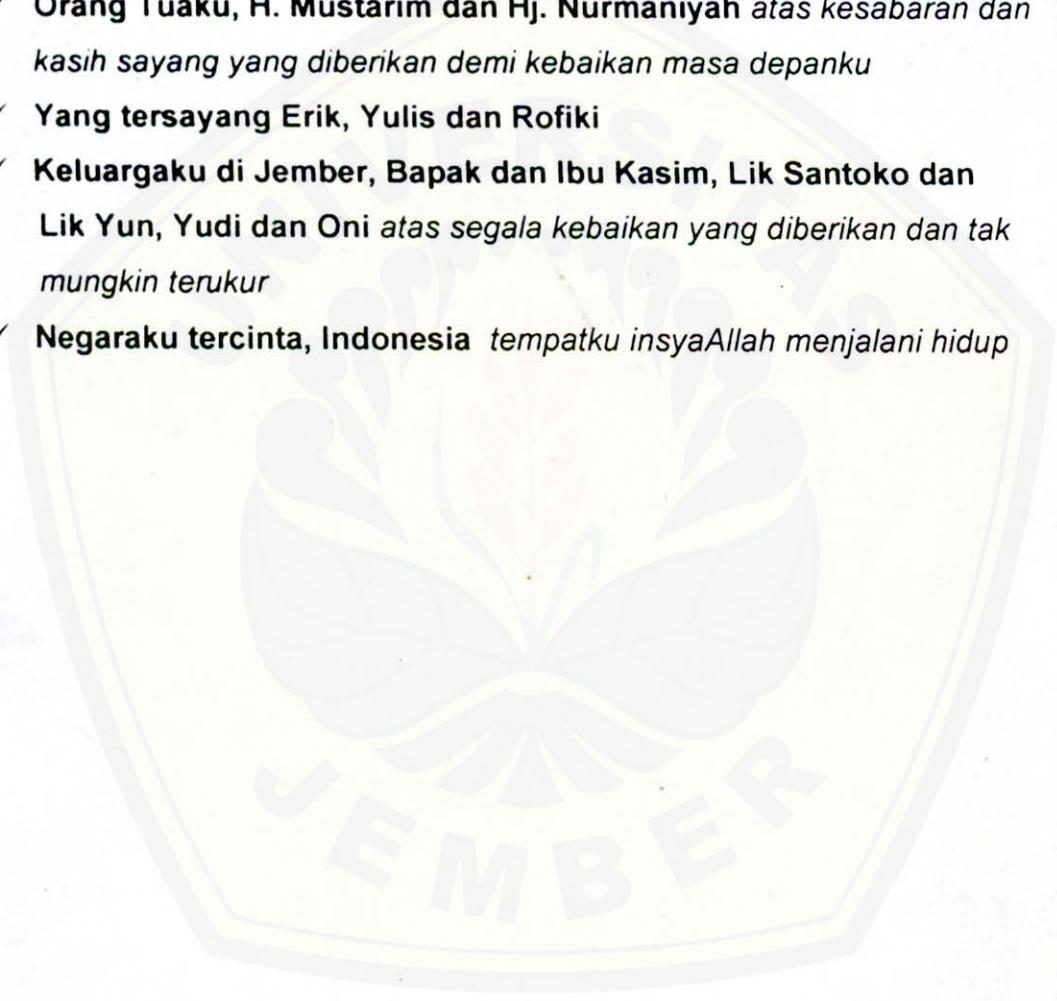
SESUATU YANG DISAMPAIKAN DENGAN PIKIRAN,  
HANYA AKAN MENYENTUH PIKIRAN.  
SEDANGKAN YANG DISAMPAIKAN DENGAN HATI YANG  
TULUS,  
AKAN MENYENTUH RELUNG HATI YANG PALING DALAM. ♣

( KH. ABDULLAH GYMNASIAR )



**Kupersembahkan karya ini kepada :**

- ✓ **Nenekku, Mu'ina** yang kasih sayangnya tiada bertepi dan bermusim
- ✓ **Orang Tuaku, H. Mustarim dan Hj. Nurmaniyah** atas kesabaran dan kasih sayang yang diberikan demi kebaikan masa depanku
- ✓ **Yang tersayang Erik, Yulis dan Rofiki**
- ✓ **Keluargaku di Jember, Bapak dan Ibu Kasim, Lik Santoko dan Lik Yun, Yudi dan Oni** atas segala kebaikan yang diberikan dan tak mungkin terukur
- ✓ **Negaraku tercinta, Indonesia** tempatku insyaAllah menjalani hidup



## Kata Pengantar

Hanya berkat kasih dan sayang Allah semata, penulis dapat merampungkan skripsi. Tulisan dengan judul " Kemerosotan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1999 di Indonesia " ini diselesaikan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisannya, penulis merasa berhutang kebaikan kepada ;

1. Bapak Drs. Nuruddin M. Yasin , sebagai Dosen Wali dan Dosen Pembimbing skripsi atas bimbingan dan arahan yang diberikan
2. Bapak Drs. Syukron Sjah SU, sebagai Kajor Ilmu Hubungan Internasional dan Drs. M. Toerki selaku Dekan FISIP
3. Bapak Drs. Umaid Radi MA, M. Iqbal S.Sos, Dr. Abu Bakar E. Hara yang telah sudi untuk memberikan pandangan-pandangannya khususnya tentang topik skripsi ini
4. Yayasan Super Semar dan BBM yang telah memberikan beasiswa yang sangat bermanfaat bagi studi penulis
5. Semua rekan di UKM Bahasa Inggris USEF, tempat penulis beraktualisasi dan berinteraksi dalam mengembangkan potensi diri
6. Semua rekan dalam Komunitas HI'97, tempat keceriaan senantiasa hidup
7. BTC Jember , atas fasilitas yang diberikan untuk kemudahan penulisan skripsi serta rekan-rekan di BTC
8. Bapak Purnomo SH., Martinus Phd., Bambang Kusbandi SH., Drs. Bambang Winarno, serta semua staff Bagian Kemahasiswaan Kantor Pusat UNEJ atas kesabarannya membimbing penulis
9. Ibu Sri Kustiati, Agus Spd., Irfan, Ali dan semua staff UPT BSPB UNEJ

10. KH. Idris, KH. Imam, KH. Fa'ie, KH. Umar, KH. Zuhri atas bimbingan spiritual yang senantiasa menyegarkan God Spot penulis
11. Bapak Drs. A. Habibullah Msi. atas masukan-masukannya kepada penulis
12. Keluarga Besar Nias 17 , Wid, Dek, Uki, Doni, Hendra, Anto, Ari, and all
13. Slamet , Lora Sep, dan semua asatids di PP. Nurul Falah tempat diskusi yang menantang
14. Teman-teman KKN Kelompok 56 , Gelombang I Tahun 2001 dan semua teman di desa Seputih Kecamatan Mayang , dimana penulis belajar untuk dewasa
15. Badan Kesatuan Bangsa Jember dan DPC PPP Jember atas bantuan datanya

Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar.

Saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan sehingga dapat meningkatkan manfaat bagi mereka yang memiliki interest terhadap studi Partai Islam maupun Islam Politik di Indonesia.

Jember, Februari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar isi	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
1.3 Permasalahan.....	6
1.4 Kerangka Dasar Teoritis .....	8
1.5 Hipotesis .....	15
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.7 Pendekatan.....	17
<b>BAB II : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI</b>	
2.1 Sejarah PPP.....	18
2.2 Heterogenitas Budaya Politik dalam PPP	
2.2.1 NU .....	21
2.2.2 MI (Parmusi) .....	24
2.2.3 SI.....	26
2.2.4 Perti.....	27
2.3 Konflik Internal Partai	
2.3.1 Konflik antar unsur.....	28
2.3.1 Konflik antara NU dengan PP .....	30

**BAB III : STRATEGI PPP MENGHADAPI PERUBAHAN POLITIK DALAM  
PEMILU 1999**

3.1 Arti Penting Pemilu 1999 .....	34
3.2 Sistem Politik Multi partai.....	37
3.3 Muktamar PPP ke-IV .....	40
3.4 Strategi PPP dalam menghadapi Pemilu 1999.....	51
3.5 Pelaksanaan Pemilu 1999.....	56

**BAB IV: PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PPP PADA PEMILU 1999**

4.1 Perolehan suara PPP pada Pemilu 1999.....	60
4.2 Penurunan perolehan suara PPP pada Pemilu 1999	
4.2.1 Konflik internal partai yang mendorong NU mendirikan PKB .....	64
4.2.2 Pergeseran dukungan Kiai NU dari PPP kepada PKB yang diikuti oleh warga NU sebagai implikasi kuatnya pengaruh Kiai dalam budaya figuritas NU .....	72

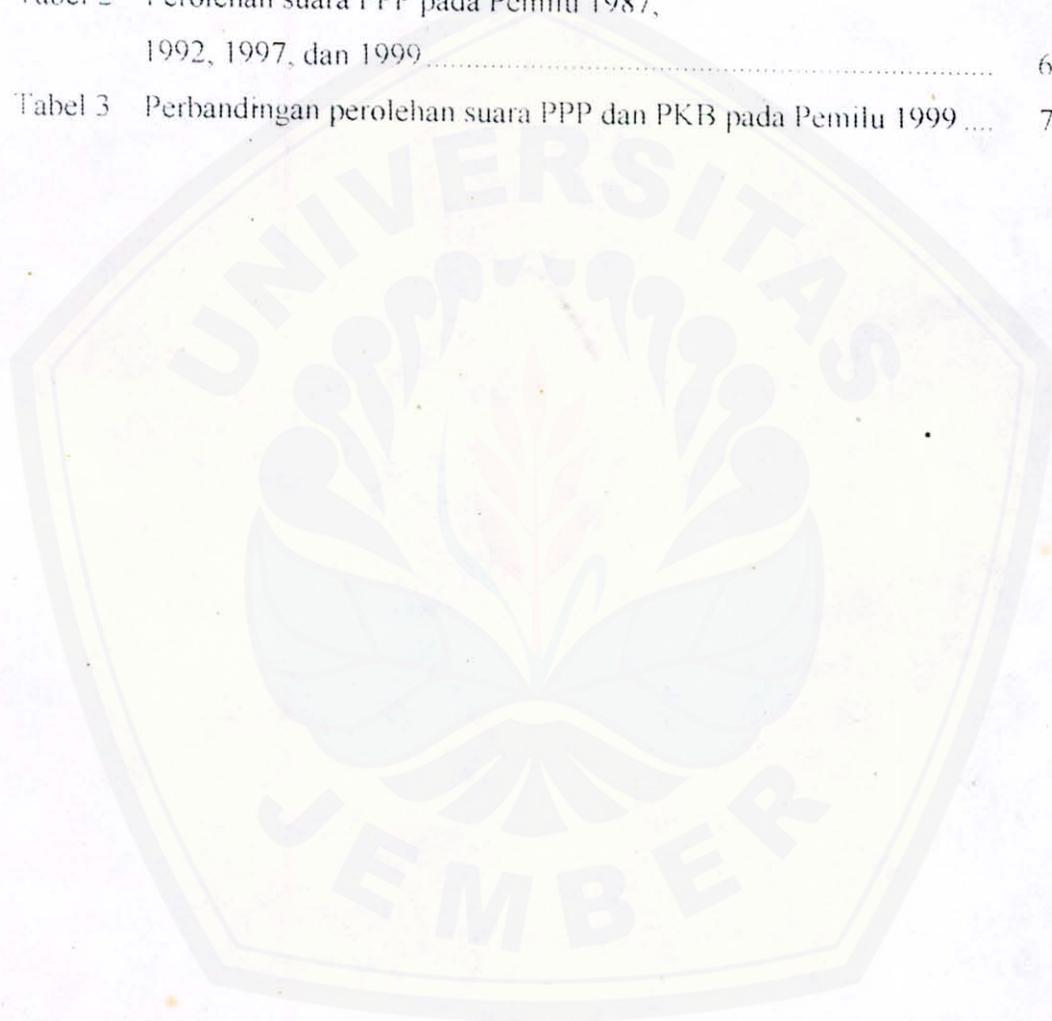
**BAB V : KESIMPULAN .....** 78

**DAFTAR PUSTAKA .....** 79

**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Perolehan suara Partai-partai pada Pemilu 1977, 1982, dan 1987 .....	32
Tabel 2	Perolehan suara PPP pada Pemilu 1987, 1992, 1997, dan 1999 .....	62
Tabel 3	Perbandingan perolehan suara PPP dan PKB pada Pemilu 1999 ....	71



## BAB I



## PENDAHULUAN

**1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Pemilu 7 Juni 1999 merupakan pemilu pertama di era Reformasi yang menjadi pintu keluar dari pemerintahan *ala* Orde Baru dan sistem politik yang monolitik. Setelah Pemilu 1955, Pemilu 1999 diyakini oleh banyak kalangan sebagai Pemilu kedua yang paling demokratis di Indonesia. Diantara beberapa hal yang menarik untuk dicatat pada Pemilu 1999 adalah fenomena lahirnya partai politik dalam jumlah terbanyak sepanjang sejarah partai politik di Indonesia yang mencapai 141 partai yang mendaftar untuk ikut Pemilu 1999. Walaupun setelah seleksi final tim 11 KPU, akhirnya "hanya" terjaring 48 partai.

Disamping partai yang telah berpengalaman mengikuti Pemilu seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya bernama Partai Demokrasi Perjuangan dan Partai Golkar yang sebelumnya bernama Golkar, terdapat juga banyak partai-partai baru. Sebagian mengklaim sebagai reinkarnasi dari partai-partai yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya, sebelum dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985 juncto UU No. 3 tahun 1975<sup>1</sup> yang memuat aturan pengurangan jumlah partai politik menjadi tiga partai demi alasan stabilitas yang ingin diwujudkan oleh ORBA.

Namun yang lebih mengejutkan lagi dari Pemilu 1999 adalah bahwa ditengah realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, ternyata partai-partai Islam gagal untuk memperoleh suara mayoritas dari 116 juta konstituen yang mayoritas adalah Muslim tersebut<sup>2</sup>. Kesimpulan ini kita ambil jika parameter yang digunakan adalah membandingkan perolehan suara partai yang tidak beraliran agama seperti PDI Perjuangan maupun Partai Golkar yang masing-masing menduduki peringkat satu dan dua dalam perolehan suara dengan PPP yang menempati urutan ke IV setelah PKB. Walaupun PPP

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, *Tiga Undang-undang Partai Politik di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1999

<sup>2</sup> Deliar Noer, et al., *Mengapa Partai Islam Kalah ?*, ALVABET, Jakarta, 1999, hal. 15

merupakan satu-satunya partai Islam yang masuk ke dalam *the Big Five*<sup>3</sup>, Namun dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu-pemilu sebelumnya, PPP mengalami penurunan drastis sekaligus paling rendah selama mengikuti Pemilu sejak tahun 1977. Partai yang merupakan fusi dari empat unsur ormas Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti tersebut hanya mendapat 10,72 % suara dan menempati posisi ke-4 setelah PDI-P, Golkar dan PKB.<sup>4</sup>

Partai ini senantiasa dirongrong dari dalam sebagai manifestasi dari konflik internal yang merupakan bagian inheren dalam PPP. Sebagai implikasi dari keanekaragaman unsur di dalamnya yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Konflik internal tersebut tidak saja mengganggu konsolidasi partai ini tapi telah mengurangi perolehan kursi PPP secara signifikan sebagaimana terlihat pada hasil Pemilu 1987 setelah konflik antara NU dengan Partai memuncak. Waktu itu PBNU menyatakan bahwa NU keluar dari ikatan fusi untuk kembali ke Khittah 1926 dan kembali berkonsentrasi sebagai Jam'iyah Diniyah yang bergerak dalam pendidikan dan aktifitas sosial lainnya. Namun demikian masih banyak dijumpai tokoh-tokoh NU yang aktif dalam partai ini. Itu terjadi karena NU sendiri belum memiliki kanal politik resmi yang didirikan atas dasar budaya politik dan tradisi NU sendiri. Karena sistem kepartaian yang ada waktu itu tidak memungkinkan NU untuk membuat partai sendiri diluar ketiga partai kontestan yang telah ada.

Membicarakan PPP tidak dapat dilepaskan dari keberadaan NU sebagai salah satu unsur yang membidani kelahiran partai hasil fusi empat partai Islam tersebut. Sejak partai ini didirikan, perjalanannya tidak pernah lepas dari pasang surut peran yang dimainkan oleh faksi NU sebagai faksi terbesar. Maka dari itu sudah sewajarnya jika NU mendapatkan kontraprestasi yang proporsional atas kapasitasnya sebagai penyumbang suara terbesar dari semua peserta fusi. Dalam kesepakatan fusi, NU mendapatkan alokasi kekuasaan yang lebih besar baik dalam struktur organisasi partai maupun jatah kursi di Parlemen dari ketiga partai lainnya yakni Parmusi, SI dan Perti.

Tapi yang dialami dan dirasakan NU sungguh tidak menggambarkan apa yang semestinya diterima. Faksi NU disingkirkan secara sistematis dalam

---

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999*, PT. Pabelan, Surakarta, 1999, hal 7

4.

perebutan dominasi PPP oleh faksi MI yang mendapat dukungan dari intervensi pemerintah Orde Baru. Konflik antara NU dengan MI yang kemudian berkembang menjadi konflik antara NU dengan PPP berlangsung dengan cukup sengit. Puncak dari konflik tersebut yang lebih dikenal dengan pengembosan PPP oleh NU menunjukkan betapa besar peranan NU dalam perolehan suara PPP seperti yang terlihat pada Pemilu 1987. Waktu itu, NU yang keluar dari ikatan fusinya menyebar ke dalam partai-partai yang lain seperti PDI dan khususnya Golkar.

Keinginan NU untuk tetap berkibrah dalam kancah politik merupakan salah satu interpretasi dari Khittah 26 NU dalam rangka mempertahankan akses terhadap kekuasaan sebagai pendukung perjuangan dan dakwah kultural yang menjadi tujuan NU. NU senantiasa berupaya untuk mendapatkan akses politik dengan menjalin hubungan dengan partai politik selama NU masih tidak dapat membentuk partai tersendiri karena faktor sistem politik yang ada. Bahkan NU lewat Pertemuan Rembang masih mencoba merebut posisi Ketua PPP dengan mengundang Matori Abdul Jalil kedalam bursa pencalonan padahal secara organisatoris, sudah tidak terdapat hubungan lagi antara NU dengan PPP kecuali hubungan antara dengan partai. Upaya tersebut semakin mempermalukan NU bukan karena tidak berhasilnya calon mereka terpilih dalam formatur tapi juga dicoretnya tokoh-tokoh vokal NU dari Daftar Calon anggota Legislatif dari PPP.

Demikianlah konflik tersebut tetap berlangsung sampai akhirnya Orde Reformasi melahirkan UU Kepartaian yang baru yang memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik baru bagi rakyat. NU segera memanfaatkan moment tersebut dan dengan dibidani PBNU akhirnya terbentuklah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diklaim sebagai partai berbasis NU dan mewarisi nilai-nilai ke-NU-an paling orisinil dibandingkan dengan partai-partai lain yang juga lahir dari kultur NU seperti PNU, PKU, SUNI. PKB juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan tokoh-tokoh utama NU seperti Gus Dur dan KH. Kholil Bisri yang merupakan pemrakarsa pembentukan PKB. Di belakang kedua tokoh tersebut dan beberapa kiai yang lain, dalam NU terdapat

---

<sup>4</sup> Sebelum stembus accord, PPP berada di urutan ke empat yang menandakan perolehan suara murni untuk PPP. Sedangkan setelah stembus accord dengan partai-partai Islam, suara PPP menempati urutan ketiga menggantikan PKB, setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

warga NU yang siap mendukung setiap kebijakan yang mereka ambil khususnya dalam memberikan suara PKB.

Pemilu 1999 kembali membuktikan kepada PPP bahwa NU tetap memiliki nilai strategis bagi PPP ditengah realitas partisipasi politik rakyat yang semakin terbuka dan persaingan partai politik yang sangat ketat. Di kantong-kantong utama massa NU, perolehan PKB jauh melesat meninggalkan PPP. Mereka lebih mengidentifikasi aspirasi politiknya kepada PKB yang mendapat dukungan para pemimpin informal mereka yaitu kiai. Kantong-kantong NU seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk Yogyakarta membuktikan hal tersebut. Di Jawa Timur, misalnya NU pernah menyumbangkan lebih dari 50 % suara dari total perolehan suara PPP secara nasional pada Pemilu 1982 sebelum NU menyatakan kembali ke Khittah 26. Di propinsi ini terdapat lebih dari 7000 pesantren yang berlatar belakang kultur NU yang kuat dan menjanjikan dukungan suara bagi partai apapun yang didukung NU. Pada Pemilu 1999, Perolehan suara PKB di daerah tersebut berjumlah 7.034.707 sedangkan PPP memperoleh 1.036.862, sebuah gap yang sangat krusial dalam perbandingan perolehan suara. Hal serupa dapat dilihat juga di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejak dahulu, daerah-daerah ini merupakan basis utama dimana suara NU berasal.<sup>5</sup> Dengan demikian PPP memperoleh 10 % suara sehingga mengalami penurunan lebih dari 100% dibandingkan dengan perolehan pada Pemilu 1997. Bagi PPP, perolehan ini juga merupakan yang paling rendah selama mengikuti Pemilu.

Penurunan perolehan suara PPP setelah kembali menjadi Partai Islam yang mengklaim memiliki ikatan emosional dan tradisional yang kuat yang pernah dibangun dengan konstituennya serta di tengah realitas sosiologis bahwa mayoritas dari 116 pemilih dalam Pemilu 1999 adalah muslim merupakan hal yang sangat menarik. Maka dari itu, Penulis mengajukan judul ; **Penurunan Perolehan Suara PPP pada Pemilu 1999 di Indonesia.**

---

<sup>5</sup> Affan Gaffar, *Javanese Voter, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, hal. 53

## 1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam suatu karya tulis ilmiah sangat diperlukan karena berguna untuk memberi batasan-batasan yang menjadi inti dari pembahasan, sehingga dapat dihindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan kabur dari permasalahan yang sebenarnya.

Menurut Sutrisno Hadi, *ruang lingkup pembahasan mempunyai maksud untuk dapat memberikan arah pembahasan yang sesuai dengan masalah serta untuk memudahkan penulis dalam memecahkan kesulitan dalam mencari data-data yang dibutuhkan.*<sup>6</sup>

Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberi formasi-formasi yang tegas terhadap pokok permasalahan tersebut. Bagi peneliti penegasan batasan-batasan ini akan menjadi pedoman, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kerancuan pengertian-pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi jangkauan guna mempertajam analisa serta memahami permasalahan secara mendalam (in depth). Lingkup pembahasan dalam hal ini dibagi dua yaitu: *pertama batasan waktu*, dalam hal ini penulis menggunakan batasan waktu antara tahun 1973 yang merupakan starting point dari sudut historis ketika PPP dibentuk dari fusi empat partai Islam sampai kepada Pelaksanaan pelaksanaan Pemilu 1999 ketika PPP mengalami penurunan perolehan suara yang merupakan palign rendah dalam sejarah PPP selama mengikuti Pemilu.

Digunakannya batasan waktu ini penting untuk mempertajam analisa permasalahan karena PPP kembali kepada khittahnya dan membangun *party identity* yaitu sebagai partai Islam. Karenanya, segmentasi pemilih semakin mengkristal dan menguat serta orientasi partai mengalami perubahan seiring dengan idntitas yang dibentuk.

*Kedua batasan materi*, dalam batasan materi ini penulis lebih memusatkan perhatian pada pencarian faktor-faktor yang berkorelasi positif terhadap penurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 1999, baik yang terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan

---

<sup>6</sup> Winarno Surrachmad, *Dasar dan Tehnik Riset; Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Transito, Bandung, 1970, hal. 12

dengan kondisi internal partai seperti konflik dan budaya politik massa PPP dan faktor eksternal yang mengikuti dinamika perubahan format politik maupun segmentasi dan perilaku pemilih (*voter's behaviour*) dalam menentukan preferensi partai pada Pemilu 1999.

Jika kemudian ada pembahasan tertentu diluar batasan materi dan waktu yang telah ditetapkan diatas, semua itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pembahasan yang lebih jelas dan elaboratif, dengan harapan tetap berada pada *track* analisa.

### 1.3. Permasalahan

Menurut **Winarno Surrachmad**, *Permasalahan adalah suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita ingin berjalan terus.*<sup>7</sup>

Dalam setiap penulisan skripsi seorang penulis pasti dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Permasalahan tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan guna mendapatkan jalan keluar.

Pada Pemilu 1997 yang merupakan Pemilu terakhir di era ORBA, PPP mendapatkan 89 kursi. Golkar dan PDI masing-masing mendapatkan 325 dan 11 kursi dari 500 suara di DPR, sedangkan sisanya adalah jatah ABRI (TNI sekarang) yang berjumlah 75 kursi.<sup>8</sup>

Pada Pemilu 1999, PPP kembali memperoleh optimisme untuk mempertahankan pemilih tradisional mereka serta merebut suara pemilih lain dalam jumlah yang signifikan. Memiliki identitas yang kuat memberikan landasan optimisme ini dimana pemilih dapat dengan mudah menentukan preferensi terhadap partai Islam. Landasan rasionalnya adalah realitas bahwa mayoritas pemilih adalah muslim. Keyakinan PPP akan perolehan suara yang signifikan didasarkan pada asumsi-asumsi berikut ;

*Pertama* , PPP akan didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang pada Orde sebelumnya menjadi pendukung Golkar sebagai Partai Pemerintah dengan kebijakan monoyalitasnya. Pada era reformasi mereka akan memilih partai

---

<sup>7</sup> *Ibid* , hal.17

<sup>8</sup> Kompas, 29 Agustus 1997

alternatif (baca : PPP) karena adanya kebebasan untuk memilih<sup>9</sup>. Apalagi, mereka sudah banyak mengerti performa pemerintahan Orde Baru yang memobilisir dukungan mereka demi penguatan status quo yang hanya menguntungkan segelintir kelompok elit.

*Kedua*, Masyarakat di desa, dimana konstituen muslim tradisional berada, banyak yang tidak senang Golkar sehingga citra Golkar yang sudah memburuk karena dianggap sebagai penyebab krisis dan akan memilih PPP. Sedangkan partai Islam lainnya belum membangun struktur partai sampai ke tingkat bawah karena mereka masih baru sehingga belum memiliki jaringan yang kuat<sup>10</sup>. Apalagi PPP telah punya pengalaman dalam beberapa Pemilu dan underbouw yang selalu siap untuk menggalang dukungan buat PPP semacam Pemuda Ka'bah yang belum dimiliki oleh banyak partai Islam yang lain.

*Ketiga*, Elit PPP yakin bahwa perolehan PPP pada Pemilu sebelumnya, 1997 sebesar 22,5 % bukan merupakan perolehan yang riil tapi telah dimanipulasi oleh Pemerintah. Mereka yakin bahwa jika Pemilu betul-betul fair , PPP pasti mendapat suara yang lebih banyak lagi.<sup>11</sup>

*Keempat*, adalah keberadaan Hamzah Haz yang merupakan tokoh NU akan mengobati luka warga NU dan kembali memberikan dukungannya kepada partai ini setelah sebelumnya NU mendapatkan perlakuan yang tidak proporsional sebagai unsur partai yang terbesar dalam PPP. Asumsi ini diambil karena resistensi di kalangan warga NU untuk memberikan dukungan kepada PPP diantaranya karena tokoh-tokoh NU tidak mendapat kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Dalam sebuah negara seperti Indonesia yang memiliki penduduk yang mayoritas muslim, ditambah dengan persiapan dan pembenahan diri partai seta pengalaman dalam mengikuti berbagai Pemilu , maka asumsi bahwa PPP akan memperoleh suara signifikan dalam Pemilu seringkali menjadi logika politik yang diyakini banyak orang. Apalagi bagi partai seperti PPP yang telah berpengalaman dan memiliki basis massa sampai ke tingkat bawah.

Logika politik diatas melahirkan realitas yang mebuyarkan optimisme PPP ketika pada Pemilu 1999 PPP mengalami penurunan perolehan suara

<sup>9</sup> Kompas, 2 Februari 1998

<sup>10</sup> Republika, 19 Agustus 1998

<sup>11</sup> Kompas, 1 Maret 1999

secara signifikan. Pembentukan dan strategi partai yang dipersiapkan tidak berbuah dukungan maksimal khususnya dari konstituen tradisional partai ini. Maka dari itu, yang menjadi focus of interest penulis adalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan diatas, yang dirumuskan dalam **Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia ?**

#### 1.4. Kerangka Dasar Teoritis

Kerangka dasar teoritis mutlak diperlukan dalam penulisan ini agar dapat membantu penulis dalam menyusun kerangka rencana kerja yang diperlukan dan pada akhirnya dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Menurut **Charles Mac Clelland**, *Teori adalah kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta yang merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, atau juga merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan.*<sup>12</sup> Sedangkan menurut **Juwono Sudarsono**, *Teori adalah simplikasi, konstruksi dan preskripsi dari apa yang ditangkap oleh pengamat*<sup>13</sup>.

Teori merupakan simplikasi karena dalam upaya memahami kenyataan atau gejala, manusia senantiasa membuat dunia luas lebih sederhana agar ia dapat memahaminya sesuai dengan latar belakang serta pengalaman hidupnya. Teori juga merupakan konstruksi karena cenderung membangun suatu kenyataan menurut apa yang ia pilih dan sederhanakan untuk mewakili kenyataan. Dan teori merupakan suatu preskripsi karena manusia menghendaki agar apa yang ia nilai baik menjadi pedoman bagi masyarakat dan lingkungan<sup>14</sup>.

PPP adalah partai yang dibentuk dari fusi empat partai Islam sebagai konsekuensi dari kebijakan restrukturisasi partai politik yang diimplementasikan oleh Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan untuk berfusi tidak berasal dari kesadaran untuk memperkuat konsolidasi partai-partai Islam (kesadaran dari dalam) tapi lebih merupakan upaya penyesuaian diri (adjustment) terhadap

<sup>12</sup> Charles Mac Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional; Teori dan System*, disunting oleh Hilman Adil, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal.10

<sup>13</sup> Juwono Sudarsono, *Perkembangan Ilmu HI dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal 5

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 6

perubahan sistem kepartaian yang dipaksakan sehingga kebijakannya bersifat *Top Down*. Sebab jika fusi tidak dilakukan, maka partai-partai tersebut akan dibubarkan. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dialami oleh partai-partai Islam tapi juga partai-partai lain yang kemudian berfusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dalam kebijakan yang dipaksakan demikian, maka sudah pasti PPP membwa serta potensi konflik sebagai wujud dari persaingan yang pasti timbul karena perebutan kekuasaan dalam dimensi yang luas maupun perbenturan beragam budaya diantara masing-masing unsur fusi. Maka dari itu, potensi konflik dalam tubuh PPP pada hakekatnya adalah bersifat inheren. Heterogenitas kepentingan serta budaya politik diantara masing-masing faksi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak dapat hilang hanya dengan konsensus yang mengikat dalam fusi, karena konsensus tersebut tidak didasarkan oleh adanya kesadaran yang mendasar karena adanya kesatuan tekad untuk kebesaran partai Islam. Konflik akan muncul manakala situasi dan kondisi partai menawarkan satu sumber kekuasaan yang terbatas yang kemudian diperebutkan oleh unsur-unsur di dalamnya. Karena sifat dari kekuasaan sangat terbatas maka alokasinya tidak dapat memuaskan semua dan akan memicu persaingan diantara unsur-unsur dalam partai untuk menjadi dominan. Akibat yang paling nyata adalah melemahnya konsolidasi partai tersebut.

Untuk menganalisa konflik dalam PPP, penulis menggunakan teori **Konflik**. Konflik dapat didefinisikan secara luas yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk perjuangan antagonistik yang nyata ataupun laten. Sedangkan dalam artian sempit, ia digunakan untuk melihat konflik dari sudut yang dapat dilihat secara nampak.<sup>15</sup>

Batasan konflik yang luas diberikan oleh Clinton Fink. Dia membatasi konflik sebagai situasi sosial atau proses dalam mana satu atau lebih kesatuan dihubungkan oleh sekurang-kurangnya suatu bentuk pertntangan hubungan psikologis atau paling tidak suatu bentuk interaksi pertentangan<sup>16</sup>

Sedangkan Robin William Jr. mendefinisikan konflik secara sempit sebagai interaksi dalam suatu entitas dimana satu satu kelompok bermaksud

<sup>15</sup> Dennis C. Pirages, *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*, FISIP-UI, Jakarta, 1982 hal. 6

<sup>16</sup> Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Dorsey Pers, Illioniss, 1978 ,hal. 181

menghilangkan, mengontrol, atau menyisihkan lainnya, melawan keinginan pihak lain itu.<sup>17</sup>

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik dalam arti yang luas sebab konflik dalam PPP yang merupakan fusi dari empat unsur tidak semata terjadi hanya sebatas dalam kehidupan politik tapi merupakan perwujudan dari benih-benih konflik yang bersifat laten sebagai konsekuensi dari keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing unsur fusi. Jika dikaitkan dengan sikap politik NU terhadap PPP yang pada Pemilu 1999 memilih mendirikan partai sendiri di luar fusi, maka sikap tersebut adalah luapan ekspresi kekecewaan dan kristalisasi konflik yang terus hidup tapi bersifat laten. Sifat konflik yang laten itu terjadi karena di satu sisi NU menjalani hubungan konfliktual dengan PPP tapi di sisi lain NU tetap menginginkan media aspirasi politik untuk memberikan dukungan bagi eksistensi dan perjuangan NU. Sikap pragmatis ini dipertahankan sampai datang suatu kesempatan di era multi partai dimana terdapat kebebasan bagi NU untuk mendirikan partai sendiri. Berdirinya PKB merupakan kongkritisasi konflik dan kekecewaan NU terhadap PPP yang sebelumnya menjadi induk organisasi politiknya.

Secara historis, timbulnya konflik antara NU dengan PPP adalah karena adanya heterogenitas dalam tubuh PPP<sup>18</sup>. Heterogenitas tersebut dapat bersifat vertikal seperti polarisasi kekayaan dan yang bersifat horizontal seperti heterogenitas kultural. Keduanya dapat ditemui dalam konflik internal PPP dimana masing-masing unsur membawa kekhasan kulturalnya sendiri yang pada derajat tertentu menghasilkan gesekan dan potensial melahirkan konflik.

NU yang berlatarbelakang Islam tradisonal dan berbasis pendidikan pesantren dengan kultur yang khas seperti otorisasi ulama dan referensi fiqh sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan dan menyandarkan diri pada tiga pilar utama yaitu basis massa dalam struktur sosial, ulama (kiai) dan politisi dalam struktur kepemimpinan dan tradisi dan nasab dalam hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan MI yang cenderung mendominasi struktur formal dan kebijakan global PPP merepresentasikan kelompok Islam Modernis dimana pertemuan keduanya dalam sebuah institusi potensial melahirkan ketegangan dan konflik. Keputusan NU untuk keluar dari

<sup>17</sup> Ibid hal 181

<sup>18</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta, 1987 hal. 57

Masyumi dilatarbelakangi oleh faktor serupa dimana NU merasa dimarginalkan oleh kelompok Islam Modernis dalam Masyumi.

Penyebab terjadinya konflik, menurut Coser dikarenakan oleh penyebab yang khas dimana terdapat perbedaan distribusi nilai-nilai dan benda yang terbatas seperti pendapatan, status, kekuasaan serta adanya dominasi teritorial.<sup>19</sup> Padahal sumber-sumber (kekuasaan) dan posisi struktural yang diperebutkan oleh masing-masing pihak yang berkonflik bersifat terbatas.<sup>20</sup> Artinya semakin sedikit posisi atau sumber yang diperoleh masing-masing anggota organisasi, maka konflik diantara mereka semakin tajam. Sumber-sumber kekuasaan dalam PPP tercermin dari posisi struktural dalam partai, khususnya posisi Ketua Umum dan jatah kursi bagi PPP di Parlemen. NU dan MI menampakkan persaingan yang ketat dan seringkali diiringi manuver-manuver politis yang keras dalam rangka memperoleh jatah sumber dan posisi yang ada tersebut. Dan NU terus mengalami kekalahan untuk mengincar posisi-posisi penting khususnya dalam partai yang menyangkut kebijakan politik global. Benih-benih konflik demikian dapat dengan mudah ditemukan dalam sebuah organisasi politik seperti partai politik yang menjadikan kekuasaan sebagai target yang ingin diperjuangkan dan dicapai dalam sebuah Pemilu.<sup>21</sup> Demikianlah, NU sebagai organisasi memutuskan mengakhiri fusi dengan PPP dan melakukan perjuangan kultural dengan lebih gencar dengan tidak meninggalkan kiprah politiknya secara total.

Sedangkan untuk melihat perilaku politik massa NU pada Pemilu 1999, akan digunakan Teori **Budaya Politik**. Sebab sebagai manifestasi dari sikap politik, perilaku politik sangat berkaitan erat dengan dan dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Menurut Almond dan Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 142

<sup>20</sup> Dennis C. Pirages Op. Cit. Hal 7

<sup>21</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 119

<sup>22</sup> Sudijono Asatroatmodjo, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hal.24

berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik<sup>1</sup>

Menurut mereka, terdapat tiga tipe budaya politik dalam suatu bangsa. *Pertama*, adalah budaya politik *Partisipan*. Budaya partisipan adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif; dengan kata lain, terhadap aspek input (untutan atau dukungan) dan output dari sistem politik itu. Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting), dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik dikategorikan dalam budaya politik partisipan.

*Kedua* adalah budaya politik *Subyek*. Dalam budaya politik ini, terdapat frekwensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek out put dari sistem itu, tapi frekwensi orientasi dari terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, hampir tidak tampak. Para Subyek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut, mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya; dan mereka menilainya sebagai absah atau sebaliknya. Tapi hubungannya terhadap sistem secara umum, dan terhadap output, administratif, atau "downward flow" nya sistem politik itu secara esensial adalah merupakan hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subyek. Orang-orang yang secara pasif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan, kita sebut berbudaya politik subyek.

*Ketiga* adalah budaya politik *Parokial*. Dalam budaya ini, frekwensi orientasi terhadap empat jenis obyek politik yaitu sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output dan pribadi sebagai partisipan aktif hampir tidak ada. Orientasi budaya ini juga tidak memiliki harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik dan kaum

---

<sup>1</sup> Gabriel Almond, *Budaya Politik ; Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1990. hal. 16

parokial tidak megarap apapun dari sistem politik. Mereka sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Mereka mungkin buta huruf, tinggal di desa yang terpencil, atau mungkin nenek-nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak-pilih dan mengungkung diri dalam kesibukan keluarga.

Berdasarkan kategorisasi diatas, maka warga NU termasuk dalam budaya Partisipan. Berpartisipasi dalam Pemilu merupakan keharusan bagi mereka sebagai implementasi dari doktrin yang mereka pegang. Sebagai komunitas muslim yang mengembangkan tradisi Sunni (Ahlussunnah wal Jama'ah), arena politik menjadi wilayah yang harus diceburi dan tidak boleh di jauhi karena pada tataran politklah keputusan yang dibuat. Doktrin yang sangat populer diantara mereka adalah *Al Islam hua al Din wa al Daulah* yang berarti bahwa Islam adalah agama dan pemerintahan (politik). Semakin besar partisipasi politik dan peran yang mereka mainkan, maka semakin besar pula kemungkinan akomodasi terhadap aspirasi warga NU yang berjumlah kurang lebih 30 juta orang tersebut. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa NU senantiasa berkepentingan untuk memiliki akses kepada kekuatan politik dalam rangka menjamin keberhasilan perjuangan keagamaan dan kultural mereka.

Walaupun dilahirkan sebagai Jam'iyah Diniyah untuk mengembalikan nilai-nilai orisinil Islam sebagai *counter* terhadap kemunculan organisasi Islam Modernis, tapi NU tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kepentingan mereka terhadap politik (kekuasaan) sangat besar. Metamorfosa NU sejak dari berfusi ke dalam Partai Masjumi, menjadi partai politik pada tahun 1952, berfusi ke dalam PPP pada tahun 1973 dan mendirikan PKB pada Pemilu 1999 membuktikan bahwa kelompok NU berpartisipasi secara aktif dalam politik.

Dalam Pemilu 1999, antusiasme warga NU dalam berpartisipasi tampak pada pendeklarasian PKB sebagai partai bertradisi NU yang paling orisinil serta pemberian suara warga NU pada Pemilu yang menyumbangkan suara signifikan terhadap partai tersebut. Bahkan dalam perkembangannya elit-elit NU secara aktif berjuang untuk memperoleh posisi politik dalam struktur kekuasaan negara. Sehingga budaya politik Partisipan telah menjadi bagian dalam NU dalam rentan waktu yang relatif lama dan telah mengakar kuat.

Menurut Almond dan Verba budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.<sup>23</sup>

Mereka melihat bahwa dalam orientasi tentang objek politik terdapat tiga orientasi yang mempengaruhinya. *Pertama* adalah orientasi kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan kewajibannya. *Kedua* adalah orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. *Ketiga* adalah orientasi evaluatif yakni keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dengan informasi dan perasaan.

Orientasi yang paling dominan yang mendasari budaya politik warga NU sebagai penyangga terkuat dalam tubuh PPP adalah orientasi yang bersifat afektif. Preferensi partai bagi mereka lebih dipengaruhi oleh perasaan (afeksi) mereka terhadap keberadaan figur-figur kharismatik yang dalam NU direpresentasikan dengan sangat baik oleh para kiai. Orientasi diluar itu seperti identitas partai, isu kampanye, dan calon-calon legislatif dari partai tersebut menjadi sekunder dan seringkali dikalahkan oleh kuatnya persepsi mereka terhadap kekuatan ketokohan sang kiai.

Selanjutnya mereka menambahkan bahwa budaya politik masyarakat merupakan hasil akumulasi dari faktor-faktor lain secara integral.<sup>24</sup> Ia juga merupakan cerminan dari kompleks nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga budaya politik NU yang dapat dicermati pada Pemilu 1999 dengan memberikan dukungannya kepada PKB bukanlah budaya baru tetapi merupakan cerminan dari budaya yang berkembang dalam kehidupan mereka sebagai kelompok Islam tradisional dengan latar belakang pesantren.

---

<sup>23</sup> Gabriel Almond, *Budaya Politik; Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta 1990, hal. 16

<sup>24</sup> Ibid hal.17

Massa NU berasal dari kalangan santri dengan pendidikan kepesantrenan yang khas. Menurut Geertz, Santri adalah (sekelompok) orang yang menjadikan kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol ekspresif yang didasarkan pada doktrin-doktrin islam sebagai orientasi jalan hidupnya yang paling utama.<sup>25</sup> Orientasi afektif dalam budaya politik NU secara jelas dapat dilihat pada budaya *patternalistik* dalam hubungan antara warga NU dengan kiyai sebagai pemimpin informal dan lokal.

Dalam menentukan preferensi partai, warga NU lebih mendasarkan pilihannya atas perasaan mereka terhadap keberadaan aktor-aktor yang ada dalam sebuah partai. Perasaan mereka terhadap keberadaan tokoh-tokoh kiai kharismatik dalam sebuah partai menuntut mereka untuk memberikan dukungan sebagai bukti ketaatan seorang murid kepada sang guru. Nilai strategis dimiliki oleh sebuah partai yang dapat merangkul figur-figur kiai dalam memobilisir dukungan massa NU.

Budaya figuritas dalam kultur NU dapat dilihat pada pola hubungan dalam aktifitas keseharian antara santri dengan guru seperti tradisi mencium tangan, meminta fatwa, memohon do'a restu dan berbagai ekspresi ketaatan yang lain yang lazim dalam tradisi NU. Tradisi ini bahkan terinstitusionalisasikan dengan baik dalam organisasi NU dimana para kiai menempati posisi sebagai Dewan Syariah dalam organisasi NU yang memiliki hak veto dan memberikan fatwa sebelum sebuah keputusan diambil. Tidak jarang, ketika kesepakatan tidak dapat diambil karena mengalami *dead lock*, fatwa kiai menjadi solusi. Begitu juga sering ditemui, bagaimana sebuah keputusan yang telah dicapai ditinjau kembali manakala kiyai tidak merestuinnya. Penolakan terhadap fatwa kiai diartikan pembangkangan yang dapat melahirkan sanksi sosial dari masyarakat (NU).

Peran yang dimainkan kiai tidak lepas dari otoritas tradisional yang dimilikinya yaitu penerapan kekuatan *personalistik* melalui peran di masa lalu dan masa sekarang yang berpengaruh sebagai pelindung, pendidik, sumber-sumber nilai, status, yang lebih tinggi dari mereka yang membentuk hubungan ketergantungan dengannya (kiai).<sup>26</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik sedangkan daya operasional struktur politik

<sup>25</sup> Geertz dalam Affan Gafar, Loc. Cit. , hal 11

<sup>26</sup> Affan Gafar, Ibid. hal 13

ditentukan oleh konteks kultural dimana struktur politik itu hidup.<sup>27</sup> Maka sebuah budaya politik akan berfungsi dengan baik jika terdapat keserasian antara kebudayaan itu dengan struktur politiknya. Sehingga, apabila struktur yang mereka dambakan dapat berjalan secara serasi, budaya politik dapat dikatakan berfungsi dengan baik dan dapat dikatakan bahwa budaya politik bangsa itu mencapai tingkat kematangan. Sedangkan orientasi terhadap objek politik ditentukan oleh faktor-faktor tradisi karena budaya politik merupakan kombinasi antara modernitas dan tradisi. Dalam konteks budaya politik, tradisi yang telah menjadi bagian yang paling berpengaruh dan mendasari tindakan individu dan kelompok tersebut tidak akan gampang berubah walaupun terjadi perubahan sistem politik dalam suatu bangsa.

Budaya menjunjung dan menempatkan figur kiai sebagai tokoh utama bahkan nyaris menjadi pengkultusan merupakan tradisi dalam kehidupan keseharian warga NU. Tradisi ini akhirnya juga memainkan peranan dalam perilaku politik mereka dalam Pemilu. Budaya figuritas sebagaimana dijelaskan diatas juga terbawa pada kehidupan politik. Ketika PBNU dan kiai-kiai NU mendirikan PKB sebagai partai dengan tradisi NU, maka warga NU segera meresponnya dengan positif berupa dukungan. Sebab dukungan kepada PKB yang menjadi partainya para kiai berarti ekspresi ketaatan mereka kepada pimpinan mereka.

Namun demikian, dampak yang lebih besar terjadi pada Pemilu 1999 ketika kiai-kiai menjadi pengurus PKB. Keberadaan mereka sangat efektif untuk memobilisir dukungan warga NU melalui *multiplier effect*. Para kiai di atas akan mempengaruhi kiai di bawahnya dan kiai di bawah akan mempengaruhi warganya untuk memilih PKB. Dan dukungan terhadap PKB tidak tanggung-tanggung berasal dari PBNU dan beberapa kiai kharismatik lainnya seperti Gus Dur sebagai Ketua PBNU, KH. Kholil Bisri dari Rembang, KH. Yusuf Muhammad dari Jember, KH. Ma'ruf Amien dari Madura dan lainnya yang berasal dari daerah dimana massa NU terkonsentrasi. Keberadaan dan dukungan kiai-kiai tersebut dijumpai dalam peringatan-peringatan keagamaan yang dilakukan oleh NU seperti Bahtsul Masail, Istighasah maupun kampanye PKB.

Maka perolehan suara PKBpun mengalir dari daerah-daerah dimana massa NU tinggal. Seperti dijelaskan diatas, Jawa Timur menyumbangkan

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 31

mayoritas suara kepada PKB sebagaimana yang terjadi pada PPP sebelum NU keluar dari fusi. Bahkan di Jawa Timur sendiri, wilayah-wilayah yang mendatangkan kontribusi besar terhadap perolehan suara PKB adalah wilayah yang bersub-kultur Madura dan Tapal Kuda. Data-data tersebut membuktikan kebenaran bahwa dimana massa NU berada dan terdapat dukungan kiai yang juga memilih PKB, massa NU juga memberikan dukungan yang sama.

Penurunan perolehan suara PPP pada Pemilu 1999 tersebut dapat dikatakan repetisi fenomena yang sama pada Pemilu 1987 ketika NU meninggalkan PPP dan menyatakan kembali ke khittah 1926. Namun demikian, dampaknya lebih besar pada Pemilu yang terakhir karena NU telah memiliki partai politik sendiri yang tidak ini tidak terjadi pada Pemilu 1987, yang walaupun dukungan suara NU tercerai-berai ke berbagai partai tetapi masih menyisakan suara yang signifikan bagi PPP.

## 1.5. Hipotesis

Hipotesis diperlukan untuk merumuskan alternatif terdekat dari berbagai macam dugaan yang dianggap benar. Jadi ia adalah jawaban sementara dari suatu penelitian namun harus diuji kebenarannya. Maka hipotesis merupakan suatu dugaan yang mungkin bisa benar atau salah.

Lebih rinci, **J.C. Plano** memberikan pengertian hipotesis sebagai berikut :

*Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan yang diharapkan akan terjadi antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris guna menentukan kesahihannya*<sup>28</sup>

Dalam menganalisa permasalahan diatas, maka penulis membuat hipotesis bahwa yang menjadi penyebab penurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 1999 adalah **konflik internal PPP yang mendorong NU mendirikan PKB dan berimplikasi pada pergeseran dukungan Kiai dari PPP kepada PKB yang diikuti oleh warga NU karena kuatnya pengaruh Kiai dalam budaya figuritas NU**

---

<sup>28</sup> J.C. Plano, Robert R. Riggs, Helena S. Robin , *Kamus Analisa Politik*, diterjemahkan oleh Drs. S. Siregar, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 81-82

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Tahap Pengumpulan Data

Penulis untuk memperoleh data menggunakan cara studi pustaka dan wawancara dengan pengamat dalam bidang tersebut maupun fungsionaris partai yang bersangkutan. Penulis melakukan penelitian kepustakaan di beberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
3. Badan Kesatuan Bangsa Jember
4. Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember

Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik dan judul.
2. Melakukan beberapa pengamatan terhadap permasalahan ini.
3. Membangun hipotesa.
4. Melacak data.
5. Klarifikasi data.
6. Analisa data.
7. Menarik kesimpulan atau formulasi hipotesis.

### 1.6.2. Metode Analisa Data

Adapun metode penulisan menggunakan *metode deduktif*. Menurut **Mohtar Mas'oeed** berarti berusaha untuk menarik prinsip-prinsip umum dengan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah. Sesudah kita bisa menguji masing-masing preposisi dengan menelaah peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan teori yang telah ditetapkan.

Perilaku politik massa pemilih tradisional PPP yang berhubungan dengan sikap memilih dan tidak memilih partai tertentu merupakan representasi dari persepsi dan akumulasi budaya politik yang terdapat pada diri mereka. Hal tersebut merupakan implikasi baik dari nilai-nilai budaya yang telah terinternalisasikan sekian lama maupun atmosfer politik yang melingkupi pelaksanaan pemilu 1999. Kasus-kasus tersebut kemudian berusaha di tarik ke dalam dan dijelaskan berdasar teori yang telah dipilih.

## 1.7. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan **Politik dan Sejarah**. Pendekatan Politik dimaksudkan untuk melihat eksistensi fenomena-fenomena politik. Telaah suatu tindakan atau peristiwa di masa lampau akan berhasil jika dikaitkan dengan masalah politik. Karena masalah politik tidak dapat dilepaskan dari masalah sejarah. Begitu eratnya hubungan keduanya, sehingga **Sir Robert Seely** mengatakan, "*History without Political science has no fruit, Political science without history has no root*"<sup>28</sup>.

Dalam pendekatan Politik, akan dianalisa kalkulasi politik dari partai dalam menetapkan berbagai strategi untuk memperoleh dukungan politik melalui Pemilu dari pemilih. Bagaimana PPP menetapkan strategi untuk merebut pemilih di era multi partai dan mempertahankan pemilih tradisionalnya. Sedangkan melalui Pendekatan Sejarah, akan dilihat faktor-faktor historis yang melatar belakangi konflik internal PPP yang pada saatnya berwujud pendirian PKB oleh unsur NU sehingga menggeser dukungan NU dari PPP kepada PKB.

---

<sup>28</sup> R. Seely, "*Introduction to Political Science*", dalam F. Isjwara, "*Pengantar Ilmu Politik*", Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 85



## BAB II

## PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI

## 2.1. Sejarah PPP

Nama PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan nama yang dipilih oleh keempat Partai yang menyepakati untuk berfusi ke dalam satu partai yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Nama-nama keempat partai yang berfusi tersebut menunjukkan ciri keislamannya dengan jelas. Dengan hanya melihat namanya, partai tersebut identik dengan partai Islam dimana anggotanya berasal dari pemeluk Islam. Namun dalam nama Partai Persatuan Pembangunan, kesan keislamannya tidak dapat dengan mudah untuk diperkirakan. Padahal banyak sekali usul dari berbagai kalangan khususnya dari anggota partai-partai yang berfusi untuk menggunakan nama yang dapat dengan mudah diidentikkan dengan Islam sehingga dapat menjadi identitas politik partai dan menarik mereka yang merasa berasal dari satu kelompok yaitu agama Islam yang merupakan agama terbesar. Nama-nama yang diusulkan diantaranya adalah Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Persatuan Muslimin Indonesia, Partai Perserikatan Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Memang nama-nama tersebut sedikit banyak cenderung mendekati nama resmi Parmusi, PSII atau nama Partai lama seperti Partai Islam Indonesia (PII). Sehingga NU merasa keberatan karena nama-nama yang diusulkan tersebut tidak mencerminkan NU yang merupakan unsur terpenting di dalam fusi karena perolehan suara yang signifikan pada Pemilu sebelumnya.

Namun demikian faktor yang paling penting dalam pemilihan nama untuk partai hasil fusi ini adalah faktor psikologis yaitu merespon "himbauan" pemerintah agar partai-partai tidak menggunakan nama Islam karena berbau aliran dan ideologis yang tidak berjalan linear dengan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir ideologisasi partai dan lebih mengarahkan mereka kepada orientasi pembangunan. Dan aspek program harus menjadi prioritas partai di atas aspek-aspek keagamaan (ideologi) dan aspek-aspek emosional lainnya. Maka ketika nama Partai Persatuan Pembangunan yang diambil, keuntungan yang

diperoleh adalah bahwa nama ini telah diperkenalkan di DPR sebagai nama resmi kelompok serta dalam rangka memenuhi himbauan pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan yang sedang digalakkan oleh Orde baru.

Walaupun Pemerintah menganjurkan agar dilakukan fusi bagi partai-partai Islam, tapi ada beberapa kalangan dalam ABRI dan militer yang memiliki sikap yang berbeda satu sama lain. Ada satu pihak yang tidak setuju dengan fusi karena dapat menjadi satu kekuatan besar yang mewakili keagamaan. Jika ini terjadi maka mereka akan menjadi ancaman atas kekuatan ABRI dan pemerintah, karena mereka akan bersatu dan membangun kekuatan yang besar. Di pihak lain, diantara mereka pun ada yang mendukung ide penggabungan partai-partai lain karena dengan demikian mereka dapat mengontrol Islam sebagai kekuatan politik. Di luar pendapat kedua diatas, ada pendapat ketiga yang menyarankan agar partai Islam diberikan tempat yang wajar, yaitu dibiarkan berkembang secara alami namun diberikan pengarahan untuk mewujudkan kesatuan. Bahkan menurut kelompok ini, kekuatan Islam harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan karena telah terbukti sebagai kekuatan yang paling anti terhadap kekuatan komunisme yang juga menjadi ancaman laten bagi pemerintah dan ABRI.

Dari kalangan Islam pun, terdapat beberapa sikap terhadap fusi partai-partai Islam ke dalam PPP. NU, misalnya dalam kongresnya di Surabaya menolak fusi tersebut karena khawatir bahwa mereka akan menjadi minoritas diantara keempat unsur dalam PPP. Tapi dalam pelaksanaan fusi, NU tidak menentang. Sedangkan PSSI, dibawah kepemimpinan M. Ch. Ibrahim dan Bustaman, S.H. yang terpilih sebagai ketua pada kongres di Majalaya tahun 1972 menyatakan menolak fusi bahkan melarang pengurusnya untuk menghadiri rapat-rapat yang mengagendakan fusi partai. Tindakan tersebut berbuntut dibentuk Tim Penyelamat PSII yang mengambil alih kepemimpinan yang sedang berlangsung dipimpin oleh M.A. Gobel dan kawan-kawannya. Tim Penyelamat tersebut khawatir jika mereka menolak fusi maka pemerintah akan membubarkan partai mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Sumitro (Kaskopkamtib) dalam pidatonya bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi partai-partai yang menolak fusi yang ditawarkan pemerintah. Pidato tersebut dengan jelas dialamatkan kepada PSII yang menolak fusi. Maka Pimpinan PSII yang baru setelah pengambil alihan, Anwar Tjokroaminoto

menyetujui kebijaksanaan untuk berfusi, dalam satu partai politik baru dan bersama dengan NU, Parmusi dan Perti. Arus ketiga adalah pendapat dari kalangan Parmusi dan Perti yang dari awal menyetujui untuk berfusi dalam partai baru karena ini merupakan pencerminan dari Ukhuwah Islamiyah untuk bersatu dalam satu kekuatan dan tidak bercerai berai.

Pada tanggal 5 Januari 1973 keempat partai Islam tersebut secara resmi berfusi dan mendeklarasikan nama partai dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Pendeklarasian tersebut diadakan di rumah Mintaredja, S.H. setelah melalui serangkaian perundingan dan musyawarah dengan semangat Ukhuwah Islamiyah.

Berbagai sikap dan pendapat terhadap fusi ke dalam PPP lahir karena pada hakekatnya dari unsur-unsur ke empat partai Islam sendiri juga masih belum siap untuk berfusi dan merasa belum matang. Mereka masih menghadapi berbagai masalah teknis organisatoris yang pelik dan menjadi batu sandungan yang selalu dapat muncul ke permukaan jika tidak segera dipecahkan bersama. Keputusan untuk berfusi baru terbatas di kalangan elit karena mereka memanfaatkan momentum dimana tahun 1973 adalah saat yang tepat untuk merealisasikan himbaun pementah terhadap partai politik. Pada lapisan bawah, di kalangan partai-partai Islam peserta fusi, masih banyak permasalahan terutama beragam pendapat baik yang pro maupun kontra terhadap fusi ke dalam PPP. Tapi menurut Syarifuddin Harahap, fusi mengalami hal yang serupa dengan proklamasi Indonesia dimana Indonesia diproklamirkan dulu baru lembaga dan struktur pemerintahan menyusul kemudian<sup>1</sup>.

Tiga hal penting yang mendasari fusi ke dalam PPP pada tanggal 5 Januari 1973 adalah pertama karena PPP tidak mau ketinggalan dari kelompok Demokrasi Pembangunan yang akan mengumumkan fusi mereka pada tanggal 10 Januari 1973. Kelompok Persatuan Pembangunan ingin segera merespon himbaunan fusi dari pemerintah. Kedua adalah semangat untuk bersatu khususnya di kalangan pimpinan yang begitu menonjol sebagai akibat guncangan psikologis karena kekalahan mereka dalam pemilihan umum tahun 1971. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang fungsionaris PPP (dulu Parmusi) Drs. Husni Thamrin yang mengatakan bahwa : " karena kami kalah

---

<sup>1</sup> Umaldi Radi, *Strategi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 1982*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1983, hal. 84

maka kami bersatu “.<sup>2</sup> Setelah mengalami kekalahan pada pemilu sebelumnya, diantara mereka tumbuh solidaritas yang diikat oleh perasaan sebagai kelompok Islam yang harus menempatkan diri sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam pentas politik. Dengan berfusi maka mereka berhadapan dapat menyatukan suara umat Islam ke dalam partai yang diasumsikan menjadi kanal aspirasi politik mereka, dan membuahkan kemenangan. Ketiga, pemerintah sudah mengajukan rancangan UU Partai Politik kepada DPR-RI yang akan mengatur tentang penyederhaan partai. Sehingga dari pada dibubarkan maka partai-partai Islam memilih cepat berfusi sehingga ketika UU tersebut disahkan mereka dapat mengatur konsolidasi yang lebih solid lagi. Keempat, dengan diambilnya langkah-langkah fusi, PPP dapat memusatkan perjuangannya dalam lembaga DPR terhadap aspek-aspek tertentu dalam rencana Undang –undang kepartaian tersebut yang secara politik akan lebih bermakna bagi perjuangan partai di masa datang, terutama soal eksistensi sebagai partai Islam yang semaikin terancam.

## 2.2 Heterogenitas Budaya Politik dalam PPP

### 2.2.1 Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi Massa Islam yang dibentuk pada tanggal 31 januari 1926 dan kini memiliki anggota sekitar 30 juta ini, mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah waljamaah. Ada dua motif utama yang melatarbelakangi kelahiran NU. Pertama adanya keinginan untuk mengembalikan Islam kepada sumbernya yang benar yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam di Indonesia serta sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan ke-Islaman dunia. Peran dari gerakan pembaruan Islam yang dimotori oleh Muhammad Abduh menjadi referensi utama dalam pembentukan NU. Perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Islam dari kejumudan yang berkembang mengobarkan semangat kalangan Islam di manapun mereka berada termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Tujuan yang kedua adalah adanya keinginan untuk menyatukan ulama dan menggunakan potensi mereka sebagai modal melawan kolonialisme dan

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 85

maka kami bersatu “ .<sup>2</sup> Setelah mengalami kekalahan pada pemilu sebelumnya, diantara mereka tumbuh solidaritas yang diikat oleh perasaan sebagai kelompok Islam yang harus menempatkan diri sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam pentas politik. Dengan berfusi maka mereka berhadap dapat menyatukan suara umat Islam ke dalam partai yang diasumsikan menjadi kanal aspirasi politik mereka, dan membuahkan kemenangan. Ketiga, pemerintah sudah mengajukan rancangan UU Partai Politik kepada DPR-RI yang akan mengatur tentang penyederhaan partai. Sehingga dari pada dibubarkan maka partai-partai Islam memilih cepat berfusi sehingga ketika UU tersebut disahkan mereka dapat mengatur konsolidasi yang lebih solid lagi. Keempat, dengan diambilnya langkah-langkah fusi , PPP dapat memusatkan perjuangannya dalam lembaga DPR terhadap aspek-aspek tertentu dalam rencana Undang –undang kepartaian tersebut yang secara politik akan lebih bermakna bagi perjuangan partai di masa datang, terutama soal eksistensi sebagai partai Islam yang semaikin terancam.

## 2.2 Heterogenitas Budaya Politik dalam PPP

### 2.2.1 Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi Massa Islam yang dibentuk pada tanggal 31 januari 1926 dan kini memiliki anggota sekitar 30 juta ini, mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah waljamaah. Ada dua motif utama yang melatarbelakangi kelahiran NU. Pertama adanya keinginan untuk mengembalikan Islam kepada sumbernya yang benar yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam di Indonesia serta sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan ke-Islaman dunia. Peran dari gerakan pembaruan Islam yang dimotori oleh Muhammad Abduh menjadi referensi utama dalam pembentukan NU. Perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Islam dari kejumudan yang berkembang mengobarkan semangat kalangan Islam di manapun mereka berada termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Tujuan yang kedua adalah adanya keinginan untuk menyatukan ulama dan menggunakan potensi mereka sebagai modal melawan kolonialisme dan

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 85

Dalam budaya dan tradisi tersebut, hubungan antara warga anggota NU dengan tokoh-tokoh pimpinan diderivasikan daripada hubungan bapak-anak ataupun guru-murid. Budaya seperti ini semakin berkembang dan tumbuh subur karena mayoritas massa NU berasal dari pedesaan dan berlatar belakang pendidikan pesantren tradisional. Dalam tradisi pesantren tradisional yang sampai sekarangpun masih dapat dijumpai terutama di Jawa dan Madura, hubungan antara guru dengan murid mengikuti pattern yang sudah lazim walaupun tidak tertulis. Beberapa manifestasi dari tradisi dan budaya tersebut adalah sikap menghormati guru tanpa batas dan mengikuti semua pendapatnya tanpa reserve, berbakti kepada guru dan melakukan semua yang diperintahkan, masih menganggap penting simbol-simbol dan sebagainya.

Para ulama ataupun kiyai memperoleh penghormatan sebagai realisasi budaya tersebut. Mereka menempati posisi-posisi penting dan menentukan dalam struktur organisasi NU. Posisi tersebut misalnya dapat dilihat pada Syuriah dimana kiyai dan ulama yang memiliki kompetensi dan integritas ilmu keagamaan diposisikan dan mereka memiliki hak istimewa (veto). Ini berarti bahwa apapun keputusan yang akan dibuat dan dihasilkan pada akhirnya harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Pendeknya, mereka adalah pengetuk palu dan punya otoritas memberikan kata akhir dalam setiap keputusan apapun.

Budaya politik yang terdapat dalam NU sebenarnya bukanlah budaya baru karena sampai batas tertentu dipengaruhi oleh budaya yang terdapat pada masyarakat Jawa. Sebagaimana dijelaskan, bahwa pendukung mayoritas dalam tubuh NU adalah mereka dengan latar belakang pendidikan pesantren tradisional yang mudah ditemukan di pulau Jawa. Budaya yang menjiwalkannya adalah budaya patron-client dimana hubungan antar rakyat dengan elit yang memiliki kekuasaan bersifat dikhotomis dan lebih bernuansa hubungan dalam ekonomi. Patron memiliki otoritas dan kekuasaan terhadap client sehingga untuk batas-batas tertentu dapat melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan kelompok yang satunya. Sebaliknya client menempati posisi subordinat dan harus mentaati Patron.

Disamping itu, ciri lain yang inheren dalam NU adalah kuatnya pertimbangan hukum fiqh yang selalu mewarnai keputusan politik yang diambil. Pada level praksisnya, sebuah keputusan politik yang disepakati oleh quorum harus mendapat persetujuan kiyai terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari

kaedah-kaedah fiqh. Sangat mungkin bahwa perspektif fiqh ini menjadikan NU sebagai partai yang dijuluki "oportunis" dan "kritis-akomodatif". Julukan ini diasosiasikan kepada NU karena beberapa keputusan dan sikap politik NU yang kritis tapi pada saat yang bersamaan juga akomodatif.

Dukungan dominan terhadap NU berasal dari masyarakat dengan budaya Islam-tradisional sebagaimana dijelaskan seperti diatas. Di Jawa Timur misalnya, massa NU berasal dari daerah tapal kuda yang memiliki "sub-kultur Madura" seperti, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan sebagian Banyuwangi. Jawa Timur menjadi penting untuk menjelaskan akseptabilitas NU pada level nasional karena pada Pemilu pertama tahun 1955, dari total jumlah suara yang diperoleh NU secara nasional sebesar 9.738.209, NU Jawa Timur mengantongi hampir separuh suara yaitu 3.260.392 suara. Banyaknya kegiatan keislaman yang dilaksanakan oleh NU serta adanya ratusan lebih pondok pesantren salaf (tradisional) di daerah ini, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perolehan suara NU. Secara nasional, NU mengokohkan diri sebagai partai Islam terbesar kedua dalam perolehan suara setelah Masjumi.

Bahkan pada pemilu 1971 yang merupakan pemilu terakhir bagi NU karena setelah itu ia harus berfusi ke dalam PPP, perolehan suara dari Jawa Timur tidak mengalami perubahan secara substansial. Perubahan hanya terjadi pada struktur organisasi saja yang menjadi kelaziman untuk proses keberlanjutan dan regenerasi sebuah organisasi. Pada Pemilu pertama di era Orde Baru tersebut, NU menempati posisi runner-up setelah PNI dan membuktikan sebagai partai Islam terbesar.

## **Era Penyederhanaan Partai**

Orde Baru mengimplementasikan format politik baru yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang menjadi tujuan bersama. Format politik baru yang dimaksudkan meliputi penataan ulang format partai politik sehingga lebih berfungsi untuk mendukung tercapainya idealisme pembangunan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat. Berkaca pada rejim sebelumnya, persaingan partai-partai yang sangat banyak seringkali melahirkan konflik yang tidak sehat dan lebih mementingkan pencapaian tujuan-tujuan politis dan kekuasaan. Partai-

partai sering terlena untuk merebut kekuasaan dan melupakan fungsi mereka sebagai instrument yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah. Sehingga aspirasi rakyat yang sangat beragam dapat diaggregasikan dan diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Penyederhanaan partai adalah kebijakan yang dipilih sehingga konflik antar partai dapat dengan mudah untuk mencapai konsensus demi kepentingan rakyat. Maka dari itu, karena NU termasuk salah satu partai Islam yang diharuskan berfusi ke dalam satu wadah, maka ia bersama tida partai Islam yang lain menyepakati untuk berfusi ke dalam sebuah partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan<sup>4</sup>.

NU merupakan unsur partai yang dominan dalam PPP yang disebabkan oleh perolehan suaranya yang terbesar dibandingkan tiga unsur fusi yang lain yaitu MI, Perti dan PSII. Maka sudah sewajarnya jika NU kemudian mendapatkan posisi strategis dan kepengurusan PPP dan lebih banyak mewarnai budaya politik partai dalam semua aktifitas politiknya. Dominasi NU pada saat fusi tampak dalam kepengurusan PPP dimana rata-rata 70 persen dari personalia berasal dari NU. Hal ini juga tampak dalam komposisi keanggotaan di DPR dimana jatah kursi untuk PPP kebanyakan diisi oleh kalangan NU.

## **2.2.2 Muslimin Indonesia (MI)**

MI merupakan penjelmaan dari Parmusi, sebuah partai Islam yang lahir di era Orde Baru. Kelahiran partai ini sebenarnya dimaksudkan sebagai kompensasi dari pemerintah yang tidak mengizinkan rehabilitasi Masjumi. MI pada hakekatnya adalah bagian dari pendukung Parmusi karena kapasitasnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dan Parmusi hanyalah menjadi wadah penyaluran politik bagi massa MI.

Dukungan terhadap MI sebagian besar dari kalangan Islam Modernis yang dapat di jumpai pada bekas Partai Masjumi dan Organisasi Muhammadiyah. Dukungan dari Himpunan Mahasiswa Islam juga dapat dilihat di MI. Ketika organisasi pendukungnya meninggalkan Parmusi, akhirnya menjadi tidak jelas masa pendukung MI. Saat itu massa pendukung MI terdiri dari politisi

---

<sup>4</sup> Umaldi Radi, Op. Cit. hal.15

yang aktif di PPP<sup>5</sup>. Berbeda dengan NU, maka MI tidak begitu mendapat dukungan dari kalangan Islam, karena budaya Islam Indonesia khususnya di Jawa lebih tercermin dalam budaya di kalangan Nahdliyin yang tradisional.

Tradisi Islam Modern yang menjadi pendukung MI pada level praksisnya tampak dalam pandangan mereka bahwa politik adalah wilayah profan, keduniaan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan wilayah agama. Mereka tidak mensakralkan politik karena politik senantiasa mengikuti dinamika kehidupan yang selalu berubah. Cara pandang ini tentu berbeda secara sangat serius dengan unsur-unsur lainnya dalam fusi khususnya NU. Dan sudah dapat dipastikan bahwa konflik akan menjadi keniscayaan diantara mereka yang masing-masing memiliki perbedaan mendasar terutama dalam budaya dan aliran politiknya. Apalagi keputusan untuk berfusi ke dalam satu partai bukanlah keinginan kalangan grass-root tapi merupakan implementasi kebijakan Top-Down yang dipaksakan.

Elit MI seringkali mengklaim bahwa MI adalah pewaris Masjumi karena mereka berbagi beberapa pandangan dan budaya yang merepresentasikan kelompok Islam Modernis. Klaim tersebut diekspresikan untuk menarik simpati pendukung Masjumi yang dipercaya masih besar dan dengan menunjukkan beberapa figur Masjumi yang mendukung MI.

Namun, demikian beberapa tokoh senior Masjumi membantah jika MI adalah kelangsungan dari Masjumi. Bahkan mereka menantang jika MI merupakan kelanjutan Masjumi apakah ada bukti formal dan tekstual tentang itu. Penolakan mereka terhadap MI karena banyak sekali perbedaan substansial maupun kebijakan MI yang kontradiktif dengan mainstream Masjumi. Salah satu bukti yang melahirkan penolakan tokoh-tokoh Masjumi terhadap MI adalah kecaman dari HS. Mintardja kepada bekas-bekas tokoh Masjumi karena mereka terlibat dalam pemberontakan PRRI<sup>6</sup>. Dengan demikian dapat diamati bahwa jika MI mengklaim sebagai representasi dari Masjumi sementara tokoh-tokoh Masjumi dikritik dan dikecam, klaim tersebut tidaklah tepat.

Rasa percaya diri yang berlebihan dari MI membawa mereka kepada perebutan kekuasaan dengan bersaing dengan ketat dengan berbagai unsur fusi

<sup>5</sup> Fachry Ali dan Iqbal A. Saimima, *Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan*, dalam Prisma, 1981, hal. 28

<sup>6</sup> Ken Ward, *The Election In Indonesia; An East Java Case Study*, Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1974, hal. 117

yang lain, terutama NU. Banyak sekali contoh pertentangan antara MI dengan Masjumi yang akan dijelaskan pada bagian lain yaitu di bagian konflik internal partai.

### 2.2.3 Sarekat Islam (SI)

Latar belakang berdirinya Sarekat Islam ada dua. Pertama adanya persaingan yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan golongan Cina. Kedua adalah sikap Superioritas orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina. SI merupakan perkembangan dari Sarikat Dagang Islam sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan<sup>7</sup>.

SI sebenarnya merupakan cikal bakal partai politik di Indonesia dan memberikan kontribusi yang positif bagi kebangkitan nasional. Aktivitas politiknya diawali pada tahun 1916 secara terang-terangan dan pada tahun 1921 SI merubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam untuk lebih memperkuat kesan dan orientasi aktifitas politik partainya. Selanjutnya ia bermetamorfosis menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1930.

Orientasi politiknya tidak terpusat pada pakem tertentu tapi menunjukkan dinamika sesuai dengan konstelasi politik yang ada. Ini sangat dipengaruhi oleh figur-figur di dalamnya yang berasal dari kelompok terpelajar sehingga memiliki sifat adaptabilitas yang sewaktu-waktu dapat berperan sesuai dengan perubahan. Perubahan tersebut misalnya ditunjukkan ketika SI terlibat dalam Volksraad di masa kolonialisme Belanda. Sikap tersebut adalah akomodatif. Pada saat yang lain ia akan bersikap non-kooperatif seperti ketika SI menolak untuk duduk dalam Volksraad.

Sikap akomodatif ditunjukkan oleh unsur SI di masa Orde Baru ketika dilakukan voting tentang dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN serta ditetapkannya P-4 menjadi Tap MPR. Sikap serupa juga dapat dilihat ketika pengesahan Undang-undang Pemilu 1980.

Menyangkut segmentasi massa pendukung, SI di dukung oleh massa dari latar belakang yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat seperti rakyat bawah, petani, buruh, kaum ningrat, pengusaha dan lain-lain.

---

<sup>7</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1982, hal.115

Namun demikian, pada fase-fase selanjutnya massa pendukungnya berpencar ke dalam partai-partai yang berbeda dimana mereka banyak menemukan persamaan orientasi dan aliran. Maka setelah merdeka, SI banyak mendapat dukungan dari massa yang berasal dari kelas Pengusaha. Dengan demikian, SI kembali menampakkan sifat aslinya yang bernuansa ekonomi (perdagangan) sehingga massa pendukungnyapun semakin memperkuat mainstream tersebut, yaitu kaum pengusaha.

#### 2.2.4 Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

Perti didirikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 1928<sup>8</sup>. Organisasi ini pada awalnya bertujuan untuk menyatukan madrasah-madrasah yang menganut faham Ahlussunnah Waljamaah dal l'tiqad dan Madshab Syafi'i. Sehingga sama dengan NU, sifat awalnya adalah organisasi kemasyarakatan khususnya dalam bidang pendidikan. Namun demikian seiring dengan perubahan tuntutan keadaan dan keinginan untuk melakukan peran yang lebih besar, maka bidang lainpun ditambah seperti sosial, ekonomi dan politik. Bidang yang terakhir disebut ini memberikan inspirasi sehingga kemudian Perti menjadi Organisasi Politik.

Massa pendukung Perti adalah madrasah-madrasah dan penganut faham Ahlussunnah Waljamaah. Walaupun Perti lebih kaku dari pada NU dalam hal penganutan Madzhab, dimana mereka hanya menganut Madzhab Syafi'i, tapi keduanya lahir dengan latarbelakang untuk merespon berkembangnya pembaruan Islam atau mungkin Islam Modernis.

Budaya politik yang menjadi pijakan pendukung Perti menyerupai NU, yaitu budaya "paternalistik" yang mempatkan ulama di tempat yang tinggi dan berhak untuk mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para massanya. Disamping itu, tingkat kritisisme terhadap hal-hal yang sudah dianggap ajeg sangat rendah dan lebih menampakkan perilaku menerima apa yang dianjurkan ataupun dilakukan oleh ulama yang menjadi panutannya tanpa reserve.

Orientasi politik Perti lebih berwarna akomodatif terhadap pemerintah di dalam hal-hal yang tidak berlawanan dengan hukum syar'i. Kesetiaan terhadap PPP sebagai induknya, merupakan hal lain yang menjadi citra Perti. Sehingga

---

<sup>8</sup> Fachry Ali, *Op. Cit.* hal.12

walaupun mendapatkan suara yang paling rendah diantara keempat partai di atas, Perti sangat loyal kepada PPP. Maka dari itu, NU sebagai unsur dominan banyak membantu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih tinggi dalam wujud memberikan posisi. Dalam beberapa kasus seperti di Jawa Timur, NU mendukung agar Perti mendapatkan kursi di DPRD I. Dukungan NU dikarenakan kesetiaan Perti terhadap partai serta adanya budaya politik yang serupa. Tentu saja NU tetap berhadapan bahwa Perti akan memberikan dukungan kepada NU sebagai unsur partai terkuat terutama untuk memenangkan persaingan dari beberapa<sup>unsur</sup> partai lain.

## 2.3 Konflik internal PPP

### 2.3.1 Konflik antar unsur dalam partai

Kemelut internal dalam Partai Politik identik dengan PPP karena berlarutnya dan semakin tereksposnya konflik tersebut menjadi konsumsi publik. Sebenarnya, kemelut dalam tubuh PPP lebih banyak disebabkan oleh perbedaan orientasi dan budaya politik diantara semua unsur yang ada di dalamnya. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan diantara mereka untuk berebut pengaruh dalam partai. Unsur yang dominan akan menjadi warna partai dan akan mendapatkan akses serta fasilitas kepada kekuasaan.

Konflik yang paling nampak terjadi antara NU dan MI dimana terdapat titik-titik yang potensial memicu konflik. NU merasa harus mendapat bagian yang lebih besar karena ia adalah partai dengan suara terbanyak pada pemilu sebelumnya sehingga layak untuk mendapatkan komposisi yang lebih besar sebagaimana yang menjadi kesepatan. Sedangkan MI, memiliki perasaan sebagai partai besar dan mengklaim penerus Masjumi yang juga merupakan partai Islam terbesar di masa Orde Lama. Klaim ini juga belum jelas karena tokoh-tokoh utama Masjumi tidak merasa jika MI mewarisi nilai-nilai Masjumi.

Puncak dari kemelut dalam tubuh PPP muncul sekitar Pemilu tahun 1982. Pemicu dari kemelut tersebut adalah perebutan kursi diantara unsur-unsur di dalam PPP, dimana unsur Muslimin Indonesia (MI) menginginkan perubahan proporsi pembagian jatah kursi dalam daftar nama calon-calon yang akan diajukan kepada LPU. MI yang mengaku pewaris partai Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar pada pemilu pertama tahun 1955 menegaskan bahwa pada pemilu 1977 MI belum sempat mengkonsolidasikan kekuatan

Bulan Bintang<sup>9</sup>. Jika pembagian kursi dalam PPP di dasarkan pada proporsi perolehan kursi partai Islam sebelum fusi, mestinya NU adalah pemilik kursi terbanyak, meninggalkan tiga unsur lainnya.

Diantara penyebab yang paling substansial menyangkut konflik internal tersebut adalah sifat dasar dan orientasi NU (khususnya generasi tua) yang relatif berbeda dengan MI. NU dengan orientasi yang bersumber pada tradisi pesantren dimana ikatan guru-urid yang memberntuk jaringan hubungan sosial yang kental dalam kurun waktu yang panjang. Tradisi senioritas keilmuan dalam NU masih kuat. Sehingga seringkali fatwa Majelis Syuso menjadi anutan dan dapat merubah setiap keputusan. Karena fatwa adalah harga mati ketika keputusan tidak dapat diambil (dead lock).

Sedangkan disisi lain, MI cenderung tidak terlalu mengaitkan masalah politik dengan masalah ubudiyah dan akidah karena masalah politik termasuk wilayah wewenang manusia. Perbedaan orientasi dan sifat dasar antara kedua unsur melatarbelakangi tindakan dari J. Naro yang berusaha menyingkirkan anggota DPR yang dinilai selalu bersuara sumbang dalam periode DPR hasil Pemilu 1977 ketika penyusunan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap dalam pemilu 1977, kemudian mengendalikan fraksi ketika menghadapi Sidang Umum MPR 1983.

Tensi konflik internal mencapai puncak ketika tanpa melalui kesepakatan, J. Naro menyusun sendiri calon-calon anggota Legislatif dengan mengeluarkan beberpa tokoh NU untuk mengurangi pengaruh NU dan memperkuat MI. Bagi kalangan NU, ini merupakan tindakan inkonstitusional dan dianggap sebagai usaha sistematis J. Naro yang memiliki kedekatan khusus denngan Pemerintah, untuk menjadi berkuasa dalam partai. Ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengintervensi partai agar dapat dikontrol dengan menempatkan orang-orangnya dalam tubuh partai.

Di masa datang konflik antara kedua unsur tersebut menandai faktor penting yang menentukan gerak langkah PPP. Keberadaan NU senantiasa terancam dan tersisihkan khususnya dalam pembagian kursi di DPR dan merasa diperlakukan tidak adil sebagai unsur dengan perolehan suara terbanyak diantara keempat unsur pendiri PPP. Penyingkiran NU yang sistematis yang

---

<sup>9</sup> eUmaudi Radi, *Loc. Cit.* hal. 180

dilakukan oleh kalangan MI terutama karena MI menguasai pucuk pimpinan PPP untuk beberapa periode. Sedangkan NU hanya mendapatkan posisi yang lebih rendah. Puncak dari kekecewaan NU termanifestasi dalam keputusan Muktamar NU pada bulan Desember 1984 di Situbondo untuk kembali ke *Khittah* 1926 sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang berhubungan dengan umat Islam. Dengan harapan bahwa eksistensi NU di luar jalur politik akan memberikan pengaruh yang lebih baik dalam aktifitas sosial dan pendidikan daripada dalam jalur politik. Namun demikian anggota NU sebagai individu memiliki kebebasan untuk terjun ke dalam dunia politik.

### 2.3.2 Konflik antara NU dengan PPP

Konflik antara NU dengan PPP merupakan perkembangan dan konkretisasi konflik antara NU dengan MI. Penguasaan kepemimpinan partai oleh dan dukungan (intervensi) pemerintah Orde baru kepada MI menjadikan konflik dipersepsikan sebagai konflik antara NU dengan PPP karena. Kebijakan partai seringkali tidak mengakomodir kepentingan semua faksi dalam partai kecuali menguntungkan faksi MI. Penguasaan sumber-sumber kekuasaan dalam PPP serta keberadaan wakil-wakil MI di Parlemen sangat mendukung proses marginalisasi NU secara sistematis dalam PPP.

Penyerahan DCS secara sepihak oleh HJ. Naro menjelang Pemilu 1982 serta pergeseran besar-besaran sejumlah tokoh-tokoh NU dalam kepemimpinan DPP PPP hasil Muktamar tahun 1984 merupakan pukulan yang sangat mendalam bagi NU selama berfusi dalam PPP. Tindakan tersebut bukan hanya dirasa tidak demokratis tetapi kedua kasus diatas cenderung diyakini sebagai rencana pengusuran peran politik NU dalam PPP. Kontribusi suara dari NU yang begitu besar bagi PPP tidak mendapatkan kontra prestasi secara proporsional sebagaimana *kesepakatan 75*.

Mengamati keadaan yang tidak menguntungkan bagi NU tersebut, para elit NU mengambil kebijakan yang sangat prinsipil dalam sejarah hubungan NU dengan PPP. Dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali ke *Khittah* 26 sebagai Jam'iyah Diniyah sehingga secara organisatoris tidak terdapat hubungan lagi antara NU dengan PPP. Sebagai konsekwensinya, NU tidak lagi berkewajiban untuk memenangkan PPP pada

Pemilu 1987<sup>10</sup>. Jika ada warga NU yang masih memilih PPP pada Pemilu, tindakan tersebut merupakan aspirasi politiknya sebagai individu dan bukan sebagai aspirasi NU.

Sosialisasi hasil Muktamar NU tersebut dilakukan oleh para kiai NU di daerah-daerah yang menjadi basis massa NU . dalam berbagai kesempatan dimana massa NU berkumpul seperti dalam peringatan Maulid, Isro' Mi'roj dan peringatan hari-hari besar keagamaan lainnya, para kiai menjelaskan bahwa antara NU dengan PPP sudah tidak ada lagi hubungan sehingga mereka tidak wajib untuk memenangkan PPP. Mereka juga menguraikan hubungan konfliktual antara NU dengan PPP terutama dikaitkan dengan kebijakan sepihak HJ. Naro yang merugikan NU. Itulah mengapa, NU yang merupakan kekuatan politik yang besar memutuskan untuk meninggalkan PPP dan meninggalkan politik praktis.

Selain dilakukan langsung melalui pengajian akbar di daerah-daerah, sosialisasi tersebut juga ditunjang oleh pemberitaan media massa serta diterbitkannya dua buah buku " Fatwa Ulama ", tentang sikap NU pada Pemilu 1987<sup>11</sup>. Secara garis besar, kedua buku tersebut mengupas hasil Muktamar Situbondo dan hubungan NU-PPP dalam Pemilu 1987. Bahkan buku "Fatwa" banyak beredar luas di kalangan pesantren-pesantren NU sehingga lebih banyak lagi massa NU yang mengerahui berakhirnya hubungan NU-PPP. Tindakan diatas kemudian lebih dikenal sebagai " pengembosan PPP" oleh NU.

Menjelang Pemilu 1987, upaya pengembosan semakin gencar untuk mengcounter kampanye yang dilakukan PPP. Setiap selesai kampanye PPP di siang harinya, maka pada malam harinya para kiai melakukan counter yang menghimbau agar massa NU menarik dukungannya dari PPP sehingga kampanye PPP menjadi kurang efektif. Tensi konflik semakin memanas ketika HJ . Naro dalam kampanyenya menganalogikan NU sebagai telur busuk yang harus disingkirkan dari keranjang PPP agar tidak merusak telur-telur yang lain yang masih bagus<sup>12</sup>.

Hasil Pemilu 1987 membuktikan betapa besar pengaruh penarikan dukungan NU dari PPP. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

<sup>10</sup> Sunardji Dahri Tiam, *Fatwa Ulama*, CV. Bumi Jaya, Gresik, 1983, hal.25

<sup>11</sup> Kedua buku tersebut adalah " NU dan Pemilu 1987 " karangan A. Zuhdi Muhdlor, Gunung Jati, Yogyakarta, 1986 dan " Fatwa" oleh Sunardji Dahri tiam, Bumi Jaya, 1988.

<sup>12</sup> Tempo, 21 Maret 1987

perolehan suara PPP mengalami penurunan secara signifikan setelah terjadinya pengembosan oleh NU.

Tabel 1

Perolehan partai-partai pada Pemilu 1977, 1982 dan 1987

NO	Partai	Perolehan pada Pemilu					
		1977		1982		1987	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PPP	18.745.565	99	20.871.800	94	13.701.428	61
2	Golkar	39.749.835	232	47.453.844	296	62.783.680	299
3	PDI	5.504.757	29	5.911.702	24	9.384.708	40

Sumber : Hasil Pemilu sejak tahun 1955 sampai pada Pemilu 1999, KPU, Jakarta, 1999

Dengan mendasarkan pada distribusi perolehan suara pada tabel diatas, kita juga dapat menyimpulkan bahwa NU tetap memrlukan kekuasaan politik untuk menjamin keberhasilan perjuangan dan dakwahnya di masyarakat. Sehingga, walaupun secara formal sudah tidak melakukan politik praktis, NU tetap melakukan manuver-manuver politis sebagaimana direpresentasikan oleh beberapa elitnya. Kita dapat melihat bahwa peningkatan perolehan suara oleh Golkar dan PDI tidak dapat dilepaskan dari pergeseran dukungan kepada partai-partai tersebut oleh beberapa elit NU yang diikuti oleh massa NU.

Manuver politik lain oleh NU dapat dilihat pada pembentukan Tim Pengendali Mukhtar (TIM) yang dibentuk NU menjelang Mukhtar PPP ke dua. Tim yang dimotori oleh KH. Kholil Bisri tersebut bertujuan menghimpun potensi NU untuk memenangkan persaingan dalam bursa calon Ketua Umum PPP dengan mengajukan Matori Abdul Jalil untuk dilawankan dengan Buya Ismail dari MI. tapi usaha mereka gagal dalam penyusunan formatur dan akhirnya Mukhtar mendudukan Ismail sebagai Ketua Umum PPP. Kepahitan yang diderita NU kembali terulang karena bukan saja calon mereka tidak terpilih, tapi beberapa

perolehan suara PPP mengalami penurunan secara signifikan setelah terjadinya pengembosan oleh NU.

Tabel 1

Perolehan partai-partai pada Pemilu 1977, 1982 dan 1987

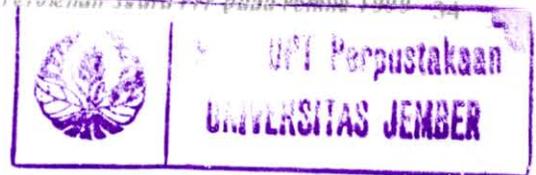
NO	Partai	Perolehan pada Pemilu					
		1977		1982		1987	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PPP	18.745.565	99	20.871.800	94	13.701.428	61
2	Golkar	39.749.835	232	47.453.844	296	62.783.680	299
3	PDI	5.504.757	29	5.911.702	24	9.384.708	40

Sumber : Hasil Pemilu sejak tahun 1955 sampai pada Pemilu 1999, KPU, Jakrta, 1999

Dengan mendasarkan pada distribusi perolehan suara pada tabel diatas, kita juga dapat menyimpulkan bahwa NU tetap memrlukan kekuasaan politik untuk menjamin keberhasilan perjuangan dan dakwahnya di masyarakat. Sehingga, walaupun secara formal sudah tidak melakukan politik praktis, NU tetap melakukan manuver-manuver politis sebagaimana direpresentasikan oleh beberapa elitnya. Kita dapat melihat bahwa peningkatan perolehan suara oleh Golkar dan PDI tidak dapat dilepaskan dari pergeseran dukungan kepada partai-partai tersebut oleh beberapa elit NU yang diikuti oleh massa NU.

Manuver politik lain oleh NU dapat dilihat pada pembentukan Tim Pengendali Mukhtamar (TIM) yang dibentuk NU menjelang Mukhtamar PPP ke dua. Tim yang dimotori oleh KH. Kholil Bisri tersebut bertujuan menghimpun potensi NU untuk memenangkan persaingan dalam bursa calon Ketua Umum PPP dengan mengajukan Matori Abdul Jalil untuk dilawankan dengan Buya Ismail dari MI. tapi usaha mereka gagal dalam penyusunan formatur dan akhirnya Mukhtamar mendudukan Ismail sebagai Ketua Umum PPP. Kepahitan yang diderita NU kembali terulang karena bukan saja calon mereka tidak terpilih, tapi beberapa

BAB III



**STRATEGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
MENGHADAPI PERUBAHAN POLITIK DALAM PEMILU 1999**

**3.1 Arti penting Pemilu 1999**

Krisis moneter yang menghantam perekonomian Indonesia dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, membuka ruang bagi kebebasan dan terciptanya masyarakat yang terbuka (*open society*). Tuntutan rakyat yang dimotori oleh Mahasiswa dan kelompok intelektual bergema dimana-mana dan berujung pada tuntutan agar Suharto meletakkan jabatan dan mengakhiri kekuasaan Orde Baru serta segera dilaksanakan Pemilu untuk membentuk pemerintahan yang legitimate yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pemilu 1999 merupakan gerbang penutup dari Orde Lama sekaligus pintu gerbang bagi era baru, era reformasi yang membawa sejuta janji perubahan bagi terwujudnya Indonesia baru yang lebih baik dan demokratis.

Pemilu merupakan instrumen demokrasi dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada hakekatnya, wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga tersebut menjadi penyambung aspirasi dan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat dalam menentukan setiap kebijakan negara maupun program-program yang harus dijalankan yang diformulasikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden dan perangkat eksekutif lainnya yang memiliki tugas untuk merealisasikan GBHN tersebut demi kepentingan rakyat sebesar-besarnya.

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan didasarkan pada azas demokrasi seperti yang dirangkum dalam azas *Luber-Jurdil* (Langsung Umum Bebas Rahasia – Jujur Adil), didorong oleh beberapa alasan. *Pertama* sebagai koreksi terhadap pelaksanaan Pemilu-pemilu masa Orde Baru yang selalu direayasa pemerintah demi kemenangan Golkar. Maka yang terjadi adalah Pemilu dengan nilai paradoksal. Di satu sisi, Pemilu dilaksanakan oleh Orde Baru untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengikuti arus demokrasi yang sedang mendapatkan momentumnya dalam sistem politik negara-negara di dunia dan pada waktu yang bersamaan, Pemilu menjadi alat mempertahankan status quo

yang senantiasa memuat pesan-pesan akan betapa besar dan hegemoniknya kekuasaan negara atas rakyat. Kecurangan dan ketidakadilan baik yang terjadi pada pra, selama dan pasca Pemilu yang dilakukan pemerintah memperkuat realitas bahwa partisipasi politik rakyat tidak terwujud.

*Kedua* adalah semakin menguatnya keyakinan bahwa hanya lewat pemilu, pemerintahan yang legitimate akan dapat diwujudkan. Di saat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan negara sudah sangat rendah, apalagi masa transisi dibawah kepemimpinan Habibie masih membawa ketidakpastian baik dalam segi ekonomi maupun politik. Sementara itu, rakyat tengah dilanda euforia kebebasan yang sangat besar untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu dianalogikan sebagai *panacea* yaitu obat yang dapat menyembuhkan berbagai luka sosial, ekonomi dan politik dalam rangka mewujudkan pemerintahan baru yang legitimate dengan perangkat pemerintahan yang yang bersih dari KKN (*good governance and clean government*).

Pemerintahan Habibie, walaupun relatif lebih baik dari Suharto sebagaimana tampak pada dukungan pemerintah akan kebebasan pers dan berpendapat misalnya, tetap tidak dapat menghilangkan imej bahwa dia (Habibie) adalah bagian dari status quo Orde Baru, karena dia adalah tokoh Golkar yang dijadikan simbol status quo dan Orde Baru, ditambah kenyataan bahwa dia adalah orang kepercayaan Suharto.

Naiknya Habibie sebagai presiden menggantikan suharto sebenarnya adalah konstitusional karena dia adalah wakil presiden di masa kepemimpinan Suharto yang sewaktu-waktu siap menggantikan posisi Presiden manakala Presiden tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya. Tapi cara Suharto menyerahkan kekuasaan kepadanya melahirkan resistensi di kalangan rakyat karena menciptakan kesan bahwa Suharto begitu saja menyerahkan posisinya kepada Habibie. Dalam masa 512 hari kepemimpinannya, telah disahkan tiga buah undang-undang baru dibidang politik yang sangat berarti bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Pemilu di era reformasi dilaksanakana pada tanggal 9 Juni 1999, dan hari pelaksanaan pemilu diliburkan sehingga anggota masyarakat diupayakan dapat berpartisipasi dengan maksimal. Bebarapa kalangan menyatakan bahwa Pemilu 1999 merupakan pemilu paling demokratis kedua setelan Pemilu 1955. Indikator dari tingkat demokratisasi pemilu ini meliputi ;

- a. Perangkat Perundang-undangan (*azas legalitas*) Pemilu yang lebih baik yaitu dengan disahkannya UU Politik yang meliputi Partai Politik, Pemilihan Umum serta kedudukan lembaga tertinggi dan tinggi negara (MPR, DPR dan DPRD). UU tersebut berisi perubahan substansial demi perwujudan pemilu yang lebih baik dengan hasil yang lebih memuaskan aspek-aspek partisipatif rakyat.
- b. Dibentuknya Komisi Pemilu (KPU) yang mandiri dengan melibatkan semua unsur (*all-inclusive*) baik utusan-utusan partai-partai peserta Pemilu maupun pemerintah, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) pasal 8 BAB III UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu<sup>1</sup>.
- c. Dijinkannya pendirian partai-partai politik di luar 3 partai peserta Pemilu Orde Baru. Eksistensi partai-partai politik yang membawa aneka ragam aliran dan azas tersebut menyiratkan beragamnya kepentingan dan aspirasi rakyat yang mesti disalurkan. Era multi partai sangat tepat untuk mengakomodir beragam aspirasi politik dengan latar belakang agama, etnis, kelompok kepentingan dan lain-lainnya.
- d. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya harus mendukung Golongan Karya sebagaimana disyaratkan dalam loyalitas tunggal. Melalui Organisasi KORPRI, suara PNS menjadi dukungan bagi Golkar sedangkan dukungan terhadap Partai di luar Golkar dilarang kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan izin. Pada era reformasi ini, mereka bebas untuk memberikan suaranya kepada partai manapun yang dirasakan paling tepat membawa aspirasi politik mereka tanpa agitasi dari pihak manapun.
- e. Dibentuknya lembaga Pengawas dan Pemantau Pemilu seperti dalam BAB IV pasal 24 ditambah dengan lembaga-lembaga pemantau Pemilu swasta independen baik dari luar maupun dari dalam negeri seperti KIPP, Forum Rektor, UNFREL dan lain-lain. Hal tersebut bernilai positif terhadap pelaksanaan Pemilu mulai dari Kampanye, pelaksanaan sampai kepada penghitungan hasil suara. Kemungkinan penyelesaian sengketa antar partai maupun pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam pemilu dapat diselesaikan dengan lebih adil dan bertanggungjawab. Sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih baik meskipun masih dijumpai beberapa pelanggaran Pemilu seperti *money politics* yang menimpa Golkar dan

<sup>1</sup> Untuk detil tugas-tugas KPU, lihat UU No. 3 Th. 1999 BAB III, pasal 8,9,10 dan 11

beberapa partai lainnya, kesalahan pada penghitungan kertas suara, dan beberapa bentuk pelanggaran lainnya.<sup>2</sup>

Dengan disahkannya UU yang baru tersebut, maka Pemilu 1999 diupayakan untuk dapat dilaksanakan sedemokratis mungkin dan melibatkan partisipasi rakyat secara luas. Partisipasi tersebut tidak hanya berbentuk pencoblosan tapi juga beberapa proses-proses lain yang menjadi prasyarat untuk terwujudnya Pemilu yang lebih demokratis. Sehingga Pemilu yang diharapkan menjadi pintu gerbang perubahan kepada kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan.

### 3.2. Kembalinya Sistem Multi Partai

Diantara perubahan-perubahan politik yang terjadi di era reformasi, munculnya berbagai aliran partai politik merupakan fenomena yang paling nampak. Pada Pemilu 1999, jumlah partai politik yang berpartisipasi merupakan jumlah terbesar selama sejarah Pemilu di Indonesia. Lebih dari 100 partai yang mendaftar ke KPU dan setelah melalui berbagai seleksi administrasi, "hanya" terdapat 48 partai yang layak ikut Pemilu.

Kelahiran partai-partai tersebut didorong oleh berbagai motivasi. *Pertama*, adalah euforia kebebasan berpolitik sebagai yang begitu gencar dan telah menggugah ketertarikan masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politik kepartaian. Setelah kurang lebih 32 tahun pemerintahan Orde Baru rakyat tidak diperbolehkan untuk mengembangkan aspirasi politik di luar mainstream politik negara, rakyat menemukan momentum kembali. Dengan persiapan seadanya, beberapa partai politik didirikan tapi akhirnya harus didiskualifikasi karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dari KPU.

*Kedua*, pendirian partai-partai tersebut dikarenakan kekecewaan mereka terhadap kinerja partai politik yang ada sebelumnya. Keberadaan partai-partai selama Orde Baru tidak lebih dari partner pemerintah yang diorientasikan untuk mendukung segenap kebijakan Orde Baru. Walaupun dalam beberapa kasus dapat dijumpai kritisisme PPP dan pada derajat yang lebih rendah PDI, tapi dalam sistem kepartaian Hegemonik hal tersebut tidak berarti dalam pendewasaan

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin, *Konfigurasi Politik Islam Pasca Suharto*, skripsi tidak diterbitkan, UGM, Yogyakarta, 2000, hal. 15

politik rakyat khususnya dalam mengembangkan oposisi terhadap pemerintah. Bahkan sikap partai politik seperti dukungan PPP terhadap pencalonan Suharto pada SU MPR 1997 merupakan indikasi betapa kuatnya hegemoni pemerintah untuk melakukan berbagai intervensi terhadap partai politik. Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dan ditentang oleh komponen yang ada di dalam partai yang bersangkutan. Sehingga kelahiran partai-partai tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap berbagai anomali yang terjadi dalam sistem kepartaian di era Orde Baru.

*Ketiga*, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya akselerasi demokratisasi politik khususnya yang diyakini sebagai sistem pemerintahan (politik) yang terbaik. Ini dipengaruhi oleh semakin gencarnya kampanye demokratisasi dalam sistem politik internasional serta menguatnya keyakinan bahwa demokratisasi politik akan menganggis Bangsa Indonesia dari segala keterpurukan akibat pemerintah yang otoriter sekian lama. Partai politik merupakan wadah aspirasi politik formal yang menjembatani kepentingan politik massa dengan pemerintah. Dengan bermunculannya partai-partai politik maka partisipasi rakyat akan semakin optimal dan terberdayakan berhadapan dengan pemerintah.

Melalui UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan partai politik baru. Sebab partai politik diharapkan menjadi sarana yang berarti, berfungsi dan berperan sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Reformasi yang lahir sebagai antitesa terhadap Orde Baru yang telah melakukan banyak penyimpangan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan negara yang diindikasikan dengan meluasnya KKN memenadang bahwa UU Kepartain yang ada sebelumnya, yaitu UU No. 3 tahun 1985 yang hanya mengakui eksistensi 3 partai politik sudah tidak relevan lagi. Sebab Indonesia yang memiliki masyarakat dengan latarbelakang yang berbeda baik daerah, suku, agama, ras, golongan dan sebagainya semestinya memiliki partai yang beraneka ragam yang mencerminkan kebhinekaan tersebut.

Kebebasan yang diberikan juga mencakup penggunaan azas partai yang disesuaikan dengan aspirasi dan ideologi yang dikehendaki oleh basis massa partai. Namun demikian, Pancasila tetap harus menjadi dasar negara dalam AD

partai dan azas partai tidak bertentangan dengan Pancasila. Jika kita amati, eksistensi partai politik pada Pemilu 1999 relatif mengikuti anatomi kepartaian sebagaimana terlihat pada pemilu multi partai pertama tahun 1955. Bahkan Pemilu 1999 sering disebut sebagai repetisi dari pemilu 1955, khususnya dari perspektif kepartaian.

Kelahiran banyak partai dapat berarti positif sepanjang didasarkan pada azas kebhinekaan, yaitu mengakui keberagaman aspirasi politik rakyat untuk dikembangkan secara maksimal. Sehingga rakyat akan mengalami pendidikan politik yang lebih baik dan lebih dewasa. Sehingga Civil Society yang ingin ditumbuhkan dalam kehidupan yang demokratis dapat dicapai. Sebab hanya dengan mengamodir aspirasi yang beragam tersebut, rakyat akan lebih dewasa secara politik. Tapi yang perlu dicermati adalah menghindarkan partai-partai dari konflik antar kelompok yang mengancam integrasi karena perbenturan berbagai kepentingan antar partai. Dalam Sistem Kepartaian yang baru, perbedaan azas dan ciri dalam partai diimplementasikan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasar Pancasila sebagai tujuan umum, dan memperjuangkan cita-cita para anggotanya sebagai tujuan khusus parpol.

Persaingan antar partai sangat ketat karena beberapa partai yang lahir memperebutkan basis massa yang sama. Misalnya, konsituen dari massa Nasionalis Demokrat diperebutkan diantaranya oleh PDI-P, PDI, PNI-Supeni, PNI-Massa Marhaen dan PNI-Front Marhaenis. Sedangkan kalangan konstituen Islam Modernis deperebutkan oleh P-Golkar, PAN, PBB, P-Masyumi Baru, PP Islam Masyumi dan lain-lain. Sedangkan kalangan konstituen Islam Tradisional dengan basis massa NU diperebutkan oleh PPP, PNU, PKU, SUNI dan PKB. Partai yang terakhir didirikan secara khusus dan resmi oleh kalangan NU. Dan ditengah kebebasan berpartisipasi politik, masing-masing partai mengembangkan berbagai strategi untuk tampil paling menarik dalam menarik massa. Pendekatan represi, agitasi dan mobilisasi dengan money politics dan militeristik seperti yang lazim dijumpai pada era Orde Baru tidak akan banyak membawa manfaat untuk menarik dukungan massa di era Reformasi.

Dalam hubungannya dengan pemilihan umum, sistim-multi partai sering dihubungkan dengan *sistem proporsional*, sebab partai-partai yang mempunyai kelebihan suara di satu daerah pemilihan dapat menambahkannya pada daerah

lain untuk menggenapkan perolehan kursi di parlemen. Disamping faktor positif yang tidak menyia-nyiaakan sisa suara diluar perolehan kursi karena dapat ditambahkan dengan perolehan suara di daerah pemilihan lain, sistem ini sangat membuka diri terhadap kelahiran banyak partai-partai baru yang menciptakan fragmentsi yang besar dan dapat mengakibatkan instabilitas karena partai-partai seringkali hanya mengejar kepentingan partainya *an sich*. Sistem Pemilu menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel terdaftar sebagaimana bunyi butir (7) pasal 1 BAB 1, UU No. 3 Th. 1999 tentang Pemilihan Umum.<sup>3</sup> Sistem ini merupakan sistem proporsional dengan modifikasi dengan varian distrik sehingga perhitungan suara dilakukan pada Tingkat I, tapi calon anggota DPR RI ditentukan oleh total suara di Tingkat II.<sup>4</sup>

### 3.3 Muktamar PPP Ke IV

Dalam menghadapi Pemilu 1999, PPP mengadakan Muktamar ke IV PPP yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 29 Nopember sampai dengan 2 Desember 1998. Muktamar dilaksanakan karena memiliki nilai strategis dalam rangka menghadapi tuntutan dan tantangan di era informasi. Ia juga merupakan langkah awal dalam rangka memodernisasi administrasi dan manajemen Partai khususnya menjelang Pemilu 1999. Tuntutan PPP agar cepat melakukan perubahan diri dimotori oleh kelompok yang tergabung dalam Komite Reformasi Partai Persatuan yPembangunan (KR-PPP).

Beberapa keputusan penting yang dikeluarkan oleh PPP dalam rangka menghadapi Pemilu 1999 diantaranya ;

#### a. Perubahan azas dan lambang Partai

Menjadi partai Islam bagi PPP adalah kembali kepada garis perjuangan pertama dimana para tokoh Islam yang mendirikan PPP bersepakat untuk menjadikan partai ini sebagai wadah aspirasi politik umat Islam Indonesia sehingga mensyaratkan penggunaan azas Islam. Tapi, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dengan terpaksa PPP harus mengganti azas dengan Pancasila guna mempertahankan diri dan tetap eksis sebagai partai yang berkompetisi dalam Pemilu.

<sup>3</sup> Ibid. hal 27

<sup>4</sup> Adil, 3 September 1999

Seiring dengan itu, PPP juga kembali menggunakan lambang Ka'bah sebagai pengganti lambang Bintang yang selama Orde Bau digunakannya. Keputusan tersebut semakin memperkuat betapa partai ini memang sudah komitmen untuk menjadi partai Islam dengan menetapkan segmentasi pemilih yang jelas.

## *b. Struktur Organisasi*

Secara garis besar struktur organisasi PPP terdiri dari Dewan Pimpinan dan Majelis Pertimbangan dan sesuai dengan daerah pemerintahan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu ;

1. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Daerah Tingkat I; dipimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan didampingi oleh Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW).
2. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Daerah Tingkat II atau yang dipersamakan ; dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan didampingi oleh Majelis Pertimbangan Cabang (MPC)
3. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang (Ancab).
4. Ranting Partai Persatuan Pembangunan didirikan di Tingkat Desa / kelurahan atau yang dipersamakan dipimpin oleh Pimpinan Ranting<sup>5</sup>

Di Tingkat Pusat , DPP terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekjen, beberapa Wakil Sekjen, seorang Bendahara dan seorang atau lebih Wakil Bendahara. Jumlah pengurus di Tingkat Pusat yang dipilih oleh Muktamar untuk masa jabatan lima tahun tidak boleh melebihi dua puluh tujuh orang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPP dibantu oleh Departemen atau Lembaga.

DPP PPP memiliki kewenangan yang sangat luas seperti yang diberikan dalam AD/ART PPP. Diantara kewenangannya adalah menentukan Kebijakan Umum , Keputusan Muktamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional dan Ketentuan-ketentuan lainnya, menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Pusat dan anggota Majelis Pakar Pusat dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan, menetapkan susunan / personalia Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan di

<sup>5</sup> Anggarran Dasar PPP Bab VII Pasal dan Bab IX Pasal 21.

MPR/DPR, dengan mendasarkan pada aspirasi dan garis kebijaksanaan di lembaga tersebut.

DPP juga berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi Persatuan Pembangunan di MPR/DPR-RI serta kepemimpinan Partai di tingkat yang lebih rendah, setelah mendengar pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Pusat. Dalam keadaan dimana DPP memandang telah terjadi kemacetan kepemimpinan partai di tingkat Wilayah/ Cabang, ia dapat mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/ Cabang Luar Biasa. Sedangkan dalam partai-partai lain dalam menyelesaikan permasalahan maka Musyawarah Wilayah/ Cabang Luar Biasa menjadi wewenang DPW dan DPC yang bersangkutan dan tidak diambil alih oleh DPP.

Majelis Pertimbangan Partai di Tingkat Pusat (MPP) merupakan lembaga yang berkerja secara kolektif dan bertugas memberikan pertimbangan, nasehat dan saran baik diminta maupun tidak kepada DPP. Dewan Pimpinan berkewajiban untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh fatwa dan nasehat yang diberikan oleh MPP. MPP terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua (sebanyak dua belas orang) dan beberapa orang anggota. Keanggotaan dalam MPP mencakup unsur ulama dan tokoh masyarakat yang jumlahnya dibatasi paling banyak tiga puluh lima orang. Ketua dan Wakil MPP dipilih dalam Muktamar dan wajib mengadakan rapat Majelis Pertimbangan paling tidak satu kali dalam setahun.

Beberapa lembaga lain dibentuk dalam rangka membantu memperlancar tugas DPP seperti dua belas Departemen, tiga Lembaga serta satu Bagian Wanita Pembangunan. Kedua belas Lembaga tersebut meliputi Departemen Pemenangan Pemilu, Organisasi dan Keanggotaan, Tenaga Kerja, Da'wah dan Hubungan Kelembagaan Masyarakat, Pengembangan Koperasi, Penerbitan, Penerangan dan Media Massa, Pemuda dan Mahasiswa, Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Tani dan Nelayan dan terakhir adalah Departemen Hubungan Kerjasama Internasional.

Di tingkat pusat, terdapat juga Majelis Pakar yang merupakan forum para cendekiawan dalam pengkajian dan pengayaan pemikiran. Di dalamnya meliputi seorang Ketua, sembilan Wakil Ketua, Sekretaris dan empat wakilnya serta lima

puluh satu anggotanya Mereka juga harus mengadakan rapat minimal sekali setahun.

## *b. Kepemimpinan Partai*

Formatur kepemimpinan DPP PPP berdasarkan Surat Keputusan No. VIII/TAP/MUKTAMAR IV/PPP/XII/1998 , terdiri dari tujuh orang yaitu : H. Hamzah Haz (NU) sebagai Ketua, H. Muhsin Bafadal, SH. (MI) sebagai Sekretaris, dan H.A. Karmani, SH. (NU), H. Syumli Sadli (NU), Dr. H.A.M. Saefuddin (MI), Drs. H. Rusjdi Hamka (MI), dan H. Yudo Paripurno, SH. (Perti), masing-masing sebagai anggota. Komposisi formatur ini mencerminkan perimbangan kekuatan secara adil khususnya antara faksi NU dan MI, yang sama-sama memiliki tiga orang wakil. Kubu Perti berhasil memasukkan seorang wakilnya, sementara kelompok SI tidak mendapatkan wakil.<sup>6</sup> Komposisi demikian dapat menghindari kemungkinan konflik internal yang selalu menjadi momok bagi PPP sejak masa lalu.

## *c. Pengambilan Keputusan*

Beberapa jenis permusyawaratan di tingkat nasional yang dilakukan oleh PPP manakala keputusan dengan dasar suara terbanyak dilakukan karena musyawarah untuk mufakat tidak membuahkan hasil yaitu Muktamar, Muktamar Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional. \_Yang menjadi bahasan di bagian ini adalah pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Muktamar diadakan setiap lima tahun sekali oleh DPP PPP dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Partai. Peserta berasal dari Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pakar Pusat, utusan DPW yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari DPW, utusan DPC yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan Fraksi PPP di MPR dan DPR serta lembaga lainnya. Syarat keabsahannya harus meliputi lebih dari seperdua jumlah wilayah dan cabang.

---

<sup>6</sup> Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar IV PPP* , DPP PPP, Jakarta, 1999, hal. 186-188

## *d. Prinsip Perjuangan PPP dalam Pemilu 1999*

Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan dirinya atas nilai - nilai dasar prinsip perjuangan yang sekaligus juga merupakan kerangka nilai-nilai yang ingin ditegakkan yang tercermin dalam pelaksanaan program-programnya. Perjuangan tanpa prinsip adalah dosa yang harus dihindari oleh segenap jajaran Partai. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud meliputi :

### 1. Prinsip Ibadah

Partai Persatuan Pembangunan dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarkannya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsipnya beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata'ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah, dan bukannya semata-mata untuk kepentingan duniawi.

### 2. Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan

Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan Partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip Perjuangan Partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wata'ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.

Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat

## d. Prinsip Perjuangan PPP dalam Pemilu 1999

Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan dirinya atas nilai - nilai dasar prinsip perjuangan yang sekaligus juga merupakan kerangka nilai-nilai yang ingin ditegakkan yang tercermin dalam pelaksanaan program-programnya. Perjuangan tanpa prinsip adalah dosa yang harus dihindari oleh segenap jajaran Partai. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud meliputi :

### 1. Prinsip Ibadah

Partai Persatuan Pembangunan dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarkannya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsipnya beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata'ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah, dan bukannya semata-mata untuk kepentingan duniawi.

### 2. Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan

Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan Partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip Perjuangan Partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wata'ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.

Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat

terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman, dan sekaligus akan menghilangkan kezaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

### 3. Prinsip Musyawarah

Partai Persatuan Pembangunan berpendirian bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahuh wata'ala. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.

### 4. Prinsip Persamaan, Persatuan, dan Kebersamaan

Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran Partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, perjuangan Partai Persatuan Pembangunan juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan. Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, Partai Persatuan Pembangunan berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proposional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan.

Partai Persatuan Pembangunan berprinsip bahwa persamaan, persatuan, dan kebersamaan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, persatuan, dan kebersamaan secara

Partai Persatuan Pembangunan berprinsip bahwa persamaan, persatuan, dan kebersamaan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, persatuan, dan kebersamaan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus-menerus serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang.

## 5. Prinsip Istiqamah

Partai Persatuan Pembangunan menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimantapkan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional

## 6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.

Dengan prinsip ini PPP berusaha untuk menciptakan budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan pembusukan politik (*political decay*) yang diakibatkan oleh sikap membiarkan kemungkaran yang lebih jauh dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.\*

## d. Program Partai Persatuan Pembangunan pada Muktamar ke IV

### 1. Politik

Dalam rangka menempatkan lembaga tinggi dan tertinggi negara secara proporsional guna mencapai efektifitas fungsinya, PPP berupaya untuk memisahkan antara Pimpinan DPR-RI dan MPR-RI sehingga dapat menjadi ppenyalur aspirasi masyarakat dan menghindarkan masyarakat untuk mebcari saluran lain yan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

PPP juga senantiasa meningkatkan upaya untuk menciptakan budaya politik yang sehat dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka

\* Zainal Abidin, Loc. Cit. hal.

menguatkan posisi dan peranan partai—partai politik sehingga dalam melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif sesuai dengan dasar organisasi sosial politik yang wajar dan mandiri dengan kedaulatan di tangan anggota. Apalagi selama ini partai-partai politik cenderung disfungsi baik karena masalah intern partai maupun pengaruh rekayasa negara.

Sebagaimana yang menjadi usulan mendesak di tingkat pusat maka pada DPRD I dan DPRD II PPP, menyarankan agar dapat lebih berperan untuk mengimbangi kekuatan eksekutif serta mendesak terwujudnya aparatatur penyelenggaraan negara yang lebih efisien, efektif, bersih, jujur dan berwibawa berlandaskan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Pada tingkat daerah sampai desa PPP memperjuangkan agar dapat terselenggarakan pemerintahan yang demokratis, bersih, jujur dan berwibawa sehingga rakyat dapat aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Karena pada dasarnya partisipasi rakyat di bawah adalah indikator yang paling nyata bahwa rakyat terlambat dalam setiap proses penyelenggaraan negara dan menjadi subjek dari pembangunan yang menentukan dalam pengambilan setiap keputusan.

Sebagai bagian dari masyarakat global, PPP senantiasa berupaya untuk dapat mewujudkan kerjasama dengan negara maupun entitas internasional yang lain dengan tetap mempertahankan politik Luar Negeri yang bebas dan aktif berorientasi kepada kepentingan nasional dengan menjalin persahabatan negara-negara di dunia dengan dasar saling menghormati dan menghargai.

## 1. Ekonomi

Pemecahan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa yaitu krisis ekonomi keuangan harus segera dilakukan dengan menyelenggarakan program penyelamatan ekonomi dan senantiasa menumbuhkan lagi pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada ekonomi rakyat.

Masalah-masalah struktural dan institusional yang menyebabkan ekonomi tingkat tinggi dimana diindikasikan dengan praktek-praktek KKN dalam berbagai proyek negara, performa dan kinerja institusi keuangan semisal perbankan guna menstabilkan nilai tukar rupiah yang semakin merosot, penurunan tingkat inflasi serta pengaturan hutang luar negeri pemerintah yang semakin membengkak harus mendapat perhatian

karena secara signifikan dapat membantu mengembalikan pertumbuhan ekonomi (*economic recovery*).

Pada tingkat bawah, PPP menginginkan agar daerah meningkatkan efektifitas pemamfaatan SDA yang dimiliki dan mengembangkannya dengan berbasis aktifitas ekonomi pada karya. Apalagi masih banyak potensi daerah yang belum dimaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan seperti potensi kelautan, ekspor non-migas, pariwisata yang dapat menghasilkan devisa.

## 2. Hukum

Manipulasi hukum yang terjadi selama ini yang mendiskriminasikan satu kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok yang lain yang berada dalam circle penguasa telah memberikan rasa ketidakadilan kepada rakyat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini kaena hukum memihak sebelah dan azas kesederatan di depan hukum tidak terwujud. Pelanggaran hukum yang lebih sangat kecil berakhir dengan penerapan sanksi hukum yang sangat berat tapi seringkali poelanggaran berat yang dilakukan mereka yang punya akses dengan kuasaan dan dengan penyusunan aparat dalam lolos dari jerat hukum. Kepastian hukum yang menempatkan rakyat dalam posisi yang sama adalah prasyarat untuk mewujudkan demokratisasi secara politik, skonomi, sosial dan budaya yaang melindungi HAM secara proporsional

## 3. Pembangunan Pertahanan Keamanan

PPP mengupayakan agar peran sosial politik yang dimiliki TNI selama ini dikaji ulang dimana telah terjadi supremasi militer atas sipil. Mereka sebagai bagian penting negara harus ditempatkan pada fungsi keamanan yang profesional guna menjamin keselamatan negara dan bangsa baik dari kekuatan disintegratif dari dalam maupun ancaman agresi dan gangguan pengacau dari luar. Sehingga diharapkan bahwa TNI adalah memang bagian integral dari rakyat dan hidup di tengah-tengah mereka. Keduanya harus saling mendukung demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Penyalahgunaan peran politik seperti masa lalu perlu dihindari sehingga terwujud prajurit pejuang dan pejuang prajurit yang profesional yang aktif mengamankan dasar negara, menentukan GBHN dan Kepala Negara melauai Lembaga MPR.

Sebagai kekuatan pertahanan negara, TNI dituntut untuk untuk mengamankan dan melindungi semua aset dan kekayaan negara dari kekuatan luar terutama di wilayah-wilayah rawan yang selama ini kuranmg terpantau seperti peraraiian laut yang

terbuka untuk dimasuki pencuri dan gangguan –gangguan lain seperti penyelundupan, pembajakan dan sebagainya.

#### 4. Otonomi Daerah dan Pembangunan Pedesaan

Kesenjangan Pembangunan yang terjadi antara Pusat dan Daerah , dan Kota dan Desa memprihatinkan PPP sehingga perlu diimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah sehingga tingkat pemerataan ekonomi dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara bersama. Jika tidak ini akan potensial untuk melahirkan beih-benih disintegrasi yang dapat mengancam persatuan. Pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan tanpa azas pemerataan hanya semakin memperlebar gap antara yang kaya yang semakin kaya karena punya modal dan akses di satu sisi dan di sisi lain rakyat miskin semakin miskin karena tidak punya akses terhadap sumber ekonomi tanpa modal yang kuat.

Pemerataan pembangunan khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali yang relatif lebih rendah mendapat prioritas dari PPP serta pemerataan pembangunan wilayah Indonesia Timur untuk mengurangi kesenjangan dengan wilayah Barat sehingga tidak melahirkan kekecewaan yang dapat menjadi penghambat pembangua. Di wilayah tersebut masih tersimpan kekayaan alam yang belum dikembangkan dan pembangunan belum mendapatkan perhatian secara penuh. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terdesentralisasi sehingga rakyat tidak berlomba datang ke pusat-pusat pembangunan seperti Jawa dan Bali.

#### 5. Agama

Dalam pembangunan kehidupan beragama, PPP sangat memperhatikan kemurdian aqidah yang tidak bercampur aduk dengan hal-hal di luar aqidah untuk menciptakan pemeluk agama yang taat. Dalam dimensi internal , pemeluk agama harus taat dengan aqidah yang terpelihara sehingga akan melahirkan sikap yang religius dengan moralitas yang tinggi sebagai modal mengisi pmebangunan. Pengusahaan agar ilai-nilai spiritual, instrumental, seremonial dan etik agama mewarnai tiap upaya pembangunan dan mencegah upaya pendangkalan yang menjadikan agama sekaedar bersifat instrumental dan sebagai legitimasi agama.

Keberagaman dalam beragaam menjadi keniscayaan di Indonesia yang mensyaratkan dikembangkannya sikap tolerensi yang saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama sehingga tercipta kerukunan beragama yang menjadi modal dasar dalam menjaga persatuan dan kerjasama untuk mengisi pembangunan dan menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945.

## 7. Perempuan

Partai Persatuan Pembangunan melihat urgensi pemberdayaan kaum wanita , karena potensi wanita juga mampu memperjuangkan masalah-masalah sosial, politik ekonomi, pendidikan , agama dan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsanya dengan upaya menampung, menyerap, menyalurkan, memperjuangkan, membela aspirasi wanita akibat proses pembangunan yang kurang manusiawi.

Partai Persatuan Pembangunan mengupayakan pengembangan organisasi wanita di semua jajaran dalam rangka rekrutmen kader secara nasional, dengan mengadakan berbagai macam kegiatan ilmiah, pelatihan, advokasi dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Partai Persatuan Pembangunan akan terus mengembangkan dan memperluas jaringan dalam pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan ormas Islam pada khususnya dan kaum wanita pada umumnya dengan membentuk jaringan pola hubungan simbiose mutualistik dan kerjasama dengan pemerintah, khususnya kantor menteri Urusan Peranan Wanita dan departemen lain dalam rangka meningkatkan peran gender dalam pembangunan. Termasuk di sini adalah upaya memperluas jaringan dengan lembaga seadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan pengkajian, penelitian, pengembangan, penerbitan, dan program aksi yang bertujuan untuk pemberdayaan wanita Indonesia di masa depan.

### 3.4 Strategi PPP dalam Pemilu 1999

Lingkungan politik yang berubah dengan segala keterbukaan yang menjadi dinamikanya, menuntut PPP untuk melakukan penyesuaian –penyesuaian sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari pemilih yang ada di luar PPP yang masih belum memastikan untuk menentukan pilihan partainya (*swinging voter*) sekaligus berupaya mempertahankan pemilih tradisionalnya yaitu pemilih muslim agar tidak lari kepada partai-partai Islam yang lain. Strategi yang disusun PPP sebagaimana menjadi keputusan dalam Muktamar partai meliputi ;

#### a. Perubahan Azas dan Lambang Partai

Keputusan untuk kembali kepada azas Islam dan menggunakan Lambang Ka'bah dicapai pada Muktamar PPP ke IV di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 1998. Islam kembali digunakan setelah UU Kepartaian yang baru memberikan kebebasan bagi partai politik untuk menggunakan azas yang beragam

sepanjang tidak menyimpang dari Pancasila sebagai azas negara. Hal tersebut merupakan pengakuan terhadap realitas sosiologis bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Bagi PPP, alasan kembali menggunakan Islam sebagai azas partai adalah dalam rangka memperjelas visi dan tujuan PPP<sup>7</sup> sekaligus penguatan jati diri partai sebagai partai hasil fusi dari partai Islam yang terpaksa meninggalkan azas Islam dan mengganti dengan Pancasila karena harus mengikuti kebijakan Orde Baru yang mengharuskan penyeragaman azas partai dan Ormas. Strategi kembali ke Islam ini dilakukan karena PPP meyakini bahwa pemilih muslim masih punya tingkat fanatisme yang tinggi terhadap Islam dengan segala simbolnya. Kemenangan Masyumi dan perolehan suara NU yang besar pada Pemilu di Orde lama dan Orde Baru sebelum kebijakan fusi dijadikan referensi dan logika yang menjadi sandaran. Apalagi jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan yang mayoritas di Indonesia. PPP tidak mau ketinggalan dari partai-partai lain yang juga menggunakan Islam sebagai azas partai seperti PKU, PNU, SUNI yang berbasiskan massa NU dan PBB, PK, Masyumi Baru, PSII yang membidik konstituen muslim dengan menggunakan azas Islam pada Pemilu 1999.

Menurut Hamzah Haz, digunakannya Islam sebagai azas Partai bukanlah solusi praktis terhadap munculnya banyak partai yang juga menggunakan Islam sebagai alirannya, tetapi muncul dari suatu keinginan murni untuk memuliakan asma Allah.<sup>8</sup> Dia menambahkan bahwa dengan menggunakan Islam PPP ingin membuktikan kepada rakyat bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dengan Islam karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, itu tidak hanya tertulis dalam teks tapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut M. Alfian Alfian, perubahan yang terjadi pada Penampilan PPP pasca Muktamar IV setidaknya dapat dilihat dari dua cermatan.<sup>9</sup> *Pertama*, perubahan substantif dan simbolis tadi merupakan manuver politik (praktis) PPP untuk mempertahankan konstituen partainya di tengah munculnya banyak partai Islam. Langkah itu adalah pilihan politik yang harus ditempuh PPP agar PPP bisa memiliki sesuatu yang bisa dijual kepada publik khususnya umat Islam.

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin, *Op. Cit.* hal . 15

<sup>8</sup> Media Indonesia, 8 Mei 1999

<sup>9</sup> Republika, 17 Desember 1998

*Kedua*, pembaruan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya PPP untuk mengaktifkan kembali ideologi Islam tatkala ideologi nasional sekuler mulai menjelma di permukaan kancah perpolitikan Indonesia mutakhir.<sup>10</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syamsuddin Haris. Menurutnya, kembalinya PPP kepada identitas semua yaitu identitas yang dipakai mulai tahun 1973 sampai dengan 1983 bisa merugikan dan menguntungkan PPP sekaligus atau bersifat positif dan negatif. Di satu sisi pergantian itu merupakan instrumen untuk memobilisasi dukungan massa pemilih Islam, sebagai yang biasa dilakukannya pada Pemilu 1977 dan 1982 lalu. Tapi pada sisi lain, PPP lupa bahwa peta politik nasional pada saat Pemilu 1999 tidak sama dengan situasi Pemilu 1977 dan 1982 karena sebagian pemilih Islam tradisional berkecenderungan memilih partai yang bersifat homogen seperti PKB bagi NU dan PBB bagi Masyumi dimana keduanya adalah bagian dari kelompok yang menjadi massa PPP. Lebih lanjut dia menilai bahwa keputusan Muktamar PPP tersebut merupakan pilihan yang salah dan tampak sebagai langkah mundur (*set back*), karena kehidupan politik dimasa depan tentunya bersifat pluralisme politik, bukan lagi sektarian atau aliran.

Menurut penulis, kembalinya PPP menjadi Partai Islam membawa konsekuensi berupa (1) Penegasan Jati Partai sebagai Partai Islam sebagaimana yang dideklarasikan oleh para pendiri (*founding fathers*) Partai ini yaitu sebagai fusi empat Partai Islam yang telah memiliki pendukung fanatiknya. Pada era reformasi ini (2) berarti menegaskan tentang eksklusifitas (keterbatasan) partai kepada mereka yang beragama Islam untuk menjadi anggota Partai - dan pada derajat yang serius - sehingga (3) pemilihnyapun terbatas kepada kelompok Muslim.

#### *b. Memilih Ketua Umum Partai dari NU*

Agenda penting dalam Muktamar PPP ke IV adalah penyusunan Formatur kepemimpinan partai yang akan menunjukkan bagaimana masing-masing unsur dalam PPP memperoleh posisi sebagai gambaran dari perimbangan pembagian kekuasaan dalam struktur keengurusan partai. Susunan Formatur yang beredar di kalangan peserta Muktamar mengutub pada dua kubu Hamzah Haz (NU) dan AM. Syaifuddin (MI).

Kelompok NU yang secara bulat mendukung Hamzah Haz telah menyusun paket formatur dengan anggota Hamzah Has, Karmani, Syumli Syadli, KH. Maemun Zubair, Zarkazih Nur, Tosari Awijaya dan Chozin Humaidy. Dukungan lain bagi Hamzah Has

<sup>10</sup> Kompas, 1 Desember 1998

datang dari kelompok di luar NU sehingga terjadi bargaining diantara mereka dan menghasilkan paket formatur baru, yang terdiri dari Hamzah Has, Karmani, Syumli Syadli, Muhsin Bafadal (NU), Ali Marwan Hanan (MI), Syaiful Anwar Husein (SI) dan Yudo Paripurno (Perti). Komposisi yang baru tersebut dilandasi oleh pertimbangan untuk menyelamatkan mereka yang membelot kepada NU dari unsurnya masing-masing.<sup>11</sup> Dalam paket formatur ini terlihat bahwa NU ingin merangkul unsur-unsur lain dalam PPP dalam kepengurusan.

Sementara itu, Formatu dari MI kesemuanya terdiri dari unsur MI yang meliputi AM. Syaifuddi, Rusjdi Hamka, Alfian Darmawan, Srsyada Pana, Bachtiar Hamsyah, Alihardi Kiaidemak dan Mudrick Sangidu. Semua dari mereka berasal dari unsur MI yang selalu menjadi saingan utama NU dalam setiap penyusunan Formatu. Dengan demikian kita dapat menganalisa bahwa konflik diantara unsur NU dengan MI untuk berebut kekuasaan masih ada dan terus hidup, walaupun bersifat laten.

Melalui Rapat Formatu pada tanggal 2 Desember 1998, Formatu Muktamar IV PPP mengeluarkan keputusan No. ISTIMEWA/KPTS/FORMATU/MUKTAMAR IV/PPP/XII/1998 tentang susunan DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat dan Majelis Pakar Pusat PPP Masa Bakti 1998-2003.

Susunan DPP PPP berjumlah 27 orang, dengan perincian 1 (Ketum), 14 (Ketua), 1 (Sekjen), 9 (Waka Sekjen), 1 (Bendahara), 1 (Wakil Bendahara). Dalam barisan Ketua Umum dan Ketua, perbandingan faksi NU dengan MI tampak berimbang sebagaimana dalam susunan formatu. Kubu NU menempatkan 6 orang wakilnya sebagaimana MI dengan Hamzah Has sebagai Ketua Umum, Perti 2 dan SI 1 orang wakil. Di jajaran Sekretaris, wakil NU 4 orang, MI 3 orang, SI 2 orang dan Perti 1 orang. Sekjen dipegang Ali Marwan Hanan dari MI tapi bergabung dengan faksi NU dalam penyusunan Formatu.<sup>12</sup> Dalam Muktamar yang diketuai oleh Drs. H. Yusuf Syakir dan Drs. Tosari Widjaja sebagai Sekretaris tersebut Hamzah Haz dari NU memenangkan 255 suara dan dukungan dari 27 DPW dan 308 DPC. Kemenangan Hamzah Haz adalah kemenangan kelompok NU dari MI setelah menunggu selama tiga Muktamar yaitu 20 tahun, sejak tahun 1984 dimana PPP selalu dipegang oleh kelompok MI.

Terpilihnya Hamzah sebagai Ketua Umum PPP memiliki arti yang sangat strategis khususnya bagi PPP. Sebab sejak didirikan pada tahun 1973, Ketua Umum selalu

<sup>11</sup> Kompas, 2 Desember 1998

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Loc. Cit.*, hal. 214

dipegang oleh MI. Periode 1973-1984 oleh HMS. Mintaredja, SH dan periode 1984-1989 HJ. Naro dimana pada periodenya konflik NU dengan MI memuncak dan berakhir dengan keluarnya NU dari PPP. Sedangkan Periode 1989-1998 dipegang oleh Ismail Hasan Materium selama dua periode. Pada periode-periode tersebut, NU harus bersabar dengan hanya menempati posisi yang tidak *decisive* seperti di Lembaga Syuriah dan MPP yang keberadaannya hanya diperlukan sewaktu-waktu.

Perjuangan NU untuk menempatkan wakilnya dalam bursa Ketua Umum selalu gagal akibat kekalahan dalam bargaining dalam penyusunan Formatour dalam karena kuatnya intervensi pemerintah Orde Baru yang lebih mendukung unsur MI karena dikenal akomodatif terhadap kebijakan negara daripada NU. Bahkan walaupun NU telah menyatakan diri keluar dari PPP secara organisatoris dalam Mukhtar Nu di Situbondo, politisi PPP dari sayap NU masih menyusun strategi untuk memenangkan persaingan merebut posisi Ketua Umum pada Pemilu 1987 lewat pertemuan fembang yang dirintis oleh KH. Kholil Bisri dan beberapa kiyai NU. Kegagalan upaya NU serta perlakuan yang tidak proporsional oleh faksi MI yang mendepak politisi NU menyimpan keinginan besar yang tak pernah padam bahwa suatu saat NU harus dapat memiliki kekuasaan politik yang besar seperti interpretasi dari Khittah, yaitu masuk ke dalam partai-partai yang telah ada dan jika memungkinkan membentuk partai sendiri.

Hamzah Has yang berlatar belakang NU telah merintis karirnya di NU sejak di kota kelahirannya Kalimantan Barat sebagai Wakil Ketua NU pada tahun 1970-1982. Sedangkan di PPP, Hamzah menjabat sebagai anggota MPP PPP di daerah yang sama pada tahun 1982. Hal yang menarik pada diri Hamzah adalah kedekatannya dengan MI yang merupakan faksi yang selalu berkonflik dengan NU, induk organisasinya. Manuver yang diambilnya, walaupun melahirkan cemoohan dari kubu NU tapi berhasil mempertahankan posisinya sebagai salahsatu Ketua DPP PPP pada kepemimpinan Buya Ismail padahal waktu itu kubu NU sedang menelan pil pahit kekalahan setelah terdepak dari kepengurusan PPP. Bagi Hamzah, kepentingan partai harus ditempatkan diatas kepentingan faksi dan unsur, sebab PPP sudah merupakan kesepakatan bersama semua unsur dalam PPP.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam Pemilu multi partai, PPP harus berjuang keras untuk menarik kembali dukungan massa tradisional yang telah menyeberang ke partai lain pada Pemilu sebelumnya, atau paling tidak mempertahankan dukungannya sebagaimana pada pemilu sebelumnya, sambil mencoba menarik massa yang masih ragu (*swinging voter*) di tengah kemunculan

banyak partai baru. Massa tradisional yang dimaksud adalah massa NU sehingga keberadaan Hamzah has menemukan rasionalisasi untuk diyakini akan mengobati sakit hati NU.

Asumsi bahwa Hamzah akan menarik dukungan NU menjadi rasional jika dikaitkan bahwa kekecewaan NU selama ini kepada PPP karena pucuk pimpinan tidak pernah dipegang oleh unsur NU. Namun hanya berharap bahwa massa NU akan tertarik kepada PPP dengan keberadaan Hamzah tidaklah cukup karena terjadinya perubahan-perubahan politik yang tidak terbaca sebelumnya.

Mengenai naiknya Hamzah Haz, Gus Dur sebagai Ketua PBNU menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan NU karena selain Hamzah tidak pernah melapor kepada induk organisasinya, di NU tidak terdapat tradisi restu-merestui. Dia menambahkan bahwa terpilihnya Hamzah karena dia adalah figur yang tepat sebagai seorang politisi yang moderat dan punya visi yang baik dan bukan karena unsur ke-NU-annya.<sup>13</sup>

Nilai strategis yang diharapkan PPP dari terpilihnya Hamzah Has mencakup dua hal. Di satu sisi adalah untuk menarik kembali dukungan massa NU kepada PPP karena dia berasal dari unsur NU. Di sisi lain PPP berharap akan merangkul massa muslim di luar NU karena PPP telah kebalik menjadi Partai Islam dan keberadaan Hamzah Has yang akomodatif dan inklusif terhadap keberadaan unsur-unsur lain di luar NU.

### 3.5 Pelaksanaan Pemilu 1999

Pemilu di era reformasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1999. Hari pelaksanaannya ditetapkan sebagai hari libur nasional guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam pencoblosan suara. Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 209.389.000 orang, yang yang berpartisipasi dalam pencoblosan pada Pemilu berjumlah 118.158.778 pemilih. Jumlah tersebut merupakan indikasi positif terhadap antusiasme masyarakat dalam menyukseskan pemilu yang akan membentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis dan legitimate.

Pelaksanaan Pemilu 1999 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan sebelumnya karena beberapa hal. *Pertama*, jumlah partai kontestan yang banyak dan merepresentasikan aspirasi dari berbagai aliran dan kepentingan. Partai-partai tersebut menambah hingar bingarnya pesta demokrasi di Indonesia dengan menciptakan nuansa berbeda dimana politik telah digandrungi oleh banyak unsur dalam

<sup>13</sup> www.astaga.com, 15 Mei 1999

masyarakat. *Kedua*, partisipasi politik rakyat yang semakin otonom. Walaupun terjadi praktek manipulasi oleh satu dua partai dengan money politics tapi secara umum, upaya mobilisasi rakyat untuk memilih partai tertentu dengan represi dan agitasi sudah sangat jauh lebih rendah. Sebab disamping terdapatnya pengawasan terhadap penyimpangan tersebut oleh baik unsur pemerintah (Panwaslu) maupun swasta (LSM), rakyat lebih merasa bebas menentukan partai pilihannya.

*Ketiga*, performa partai-partai dalam pemilu lebih terbuka. Bahkan keterbukaan tersebut dapat dilihat dalam fase kampanye partai yang dilakukan secara terbuka baik dalam forum maupun di televisi. Partai-partai kontestan menampilkan tokoh-tokoh pentingnya untuk berdebat dengan tokoh-tokoh dari partai lain tentang isu-isu sentral yang paling menarik. Isu-isu utama dalam kampanye meliputi demokratisasi, pembenahan ekonomi, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat dan lain-lain. Diharapkan bahwa hal tersebut adalah langkah maju sejalan dengan keinginan bahwa motivasi utama rakyat untuk memilih partai lebih didasarkan pada isu dan platform partai sebagaimana dijumpai di negara-negara demokratis. Namun demikian, kenyataannya faktor-faktor lain seperti faktor ketokohan menjadi lebih menarik sebagai motivasi untuk memilih partai.

Dalam Pemilu, di samping keberadaan konstituen tradisional masing-masing partai terdapat juga kelompok konstituen yang mengambang (*swinging voters*) yang dapat mengalihkan dukungannya kepada partai yang berbeda-beda. Sehingga partai politik tidak hanya berupaya mempertahankan ikatan fanatisme tradisional konstituennya tapi juga berupaya menjual isu-isu strategis yang sedang mendominasi wacana keseharian terutama merespon perubahan-perubahan politik, krisis ekonomi, masalah demokrasi, dan lain-lain.

Secara umum, partai-partai Islam membidik konstituen yang relatif sama yaitu mereka yang memandang bahwa formalisme dan simbol Islam dalam sebuah partai bernilai sama pentingnya dengan substansi Islam sendiri. Maka dari itu, partai-partai tersebut menonjolkan azas Islam serta dukungan tokoh Islam dalam kampanye. Mencoblos partai Islam diasumsikan sebagai bagian dari melaksanakan Islam secara komprehensif (*kaffah*). Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama dan di awal Orde Baru dimana wacana formalisme Islam (Islam Politik) begitu menggema sehingga membuat resah pemerintah akan ancaman Islamisasi birokrasi dan negara yang segera direspon dengan kebijakan pembubaran partai Islam dan

restrukturisasi (penyederhanaan) partai. Partai-partai dalam kategori ini diantaranya adalah PPP, PK, PBB, SUNI, PKU, PSII, PNU dan lain-lain.

Partai-partai nasionalis mengarahkan targetnya kepada kelompok nasionalis yang juga telah memiliki ikatan emosional yang kuat. Golkar masih optimis mempertahankan dukungan birokrasi yang menjadi salah satu soko guru dalam setiap pemilu. Walaupun azas mono loyalitas telah dihapuskan bagi PNS, tapi masih banyak dari mereka yang memberi dukungannya kepada Golkar karena alasan-alasan tertentu seperti perasaan berhutang budi karena kebaikan Golkar selama ini kepada mereka. Sedangkan PDIP yang membidik kelompok nasionalis-demokrat juga mendapat dukungan dari pemilih pemula dan kelompok-kelompok dari ekonomi bawah di perkotaan. PDIP diasumsikan sebagai representasi dari kelas bawah yang tertindas atau sebagaimana elit PDIP menyebut bahwa partai mereka adalah partainya wong cilik. Frustrasi rakyat yang sangat dalam karena krisis ekonomi serta perasaan kagum kepada Megawati, sang Ketua baik karena dia selalu tertindas selama Orde Baru maupun karena genealogisnya sebagai anak seorang Proklator RI, Sukarno yang sangat kharismatik.

Terdapat juga partai-partai yang mendasarkan mayoritas dukungannya dari kelompok Islam tapi tidak secara formal menggunakan Islam sebagai azas partai. Partai-partai tersebut seperti PAN dan PKB. Keduanya mengharapkan dukungan dari masing-masing ormas yang memiliki kedekatan emosional seperti Muhammadiyah bagi PAN dan NU bagi PKB. Tidak menutup kemungkinan dukungan bagi partai-partai tersebut juga datang dari mereka yang tertarik kepada keterbukaan dan sifat inklusifitas partai yang bersangkutan. Kalangan intelektual Islam banyak dijumpai dalam PAN dan PKB mendapat dukungan mayoritas dari warga NU.

Disamping itu, terdapat juga partai-partai kecil lainnya yang basis massanya belum jelas atau dikenal dengan partai gurem. Beberapa dari mereka lahir sebagai respon dari kebebasan di era reformasi ataupun kepentingan sesaat lainnya seperti keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Partai-partai tersebut dengan sendirinya akan terseleksi secara alami karena dukungan terhadap mereka tidak kuat dan temporer.

Seperti yang telah diprediksi oleh beberapa pakar, terdapat lima partai dengan perolehan suara terbesar. Kelima partai tersebut adalah PDIP yang memperoleh 35.706.618 suara dan 153 kursi, Partai Golkar 23.742.112 dan 120 kursi, PKB

13.336.963 dan 51 kursi, PPP 11.340.387 dan 58 kursi<sup>14</sup> dan PAN 7.528576 dan 34 kursi.

Secara sederhana dapat kita asumsikan bahwa pada Pemilu 1999 partai-partai nasionalis lebih diminati oleh rakyat daripada partai-partai Islam walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan bahasa lain kita dapat mengambil kesimpulan bahwa azas, platform, program dan caleg masing-masing partai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dukungan konstituen terhadap partai yang bersangkutan. Terdapat variabel lain yang dapat menjelaskan fenomena dukungan mereka terhadap partai politik.

Asumsi ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan dan strategi PPP dalam Pemilu. Lepas apakah kembali kepada partai Islam adalah set back ataupun responsif terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, pertimbangan-pertimbangan kultural yang mendasari dukungan rakyat terhadap PPP tidak dapat diabaikan begitu saja. Strategi partai tidak bisa hanya implementasi dari cetak biru yang dihasilkan dalam kebijakan umum PPP tanpa mengindahkan faktor-faktor lain yang sering dianggap tidak signifikan. Sehingga PPP terpaksa kehilangan dukungan signifikan dari kelompok konstituennya yang sekian lama mendukungnya.

Walaupun disinyalir terdapat beberapa penyimpangan dan manipulasi yang dilakukan oleh beberapa partai seperti isu money politics, tapi Pemilu 1999 dapat berlangsung dengan lancar dan hasilnya akseptabel. Pemilu 1999 juga dikategorikan sebagai pemilu demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. Sehingga rakyat akan memiliki wakil-wakil mereka yang relatif lebih representatif dan legitimate. Terdapat 500 kursi wakil rakyat di lembaga DPR yang terdiri dari 462 kursi dari wakil yang dipilih dan 38 kursi untuk wakil dari TNI.

---

<sup>14</sup> perolehan suara PKB di luar Jawa lebih rendah dari PPP sehingga mempengaruhi jumlah kursi yang didapat sebab harga sebuah kursi di Jawa jauh lebih mahal daripada di luar Jawa.

BAB V

KESIMPULAN

Konstelasi politik di era reformasi mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa hal. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak serta merta berdiri sendiri tapi merupakan implikasi bahkan repetisi dan fenomena yang terjadai pada masa-masa sebelumnya sehingga layak dijadikan referensi bagi partai politik. Partai-partai dituntut melakukan adjustment tidak saja agar dapat merespon tuntutan reformasi tapi juga mengintegrasikan diri dengan aspirasi konstituen.

Bagi PPP yang telah memiliki pengalaman relatif lama dalam mengikuti Pemilu, strategi yang menjadi pilihan partai ini ternyata tidak mampu mempertahankan dukungan pemilih tradisionalnya khususnya dari kalangan Nahdliyin. Pada Pemilu 1999, NU memberikan dukungannya kepada PKB yang merupakan partai baru yang kelahirannya dibidani oleh PBNU. Massa NU memberikan suara kepada PKB karena mempersepsikan bahwa para pemimpin mereka ada dalam partai ini dan tidak lagi dalam PPP. Sikap politik figuritas yang sangat kuat dalam budaya mereka mengkandaskan harapan PPP yang sudah ditinggalkan oleh kiai-kiai NU.

PPP perlu menyadari bahwa konflik internal yang disebabkan perebutan kekuasaan antar faksi dalam partai semestinya dapat diredam dengan kebijakan yang akomodatif dan inklusif dimana masing-masing faksi merasakan keadilan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Partai tidak saja menjadi wadah dan arena perebutan dan distribusi kekuasaan diantara elitnya, sehingga apa yang menjadi keputusan elit akan direspon positif oleh konstituen dalam Pemilu. Mengadaptasikan diri dengan budaya politik dari konstituen tradisionalnya, khususnya NU bagi PPP menjadi sebuah keharusan. Jika tidak maka PPP hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan diantara para elitnya dan partai hanya menterjemahkan blue print kebijakn partai yang tidak berbasis pada realitas konstituennya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Almound, Gabriel, 1990. *Budaya Politik; Tingkah Laku dan demokrasi di Lima Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- Budiarjo, Mariam (ed.), 1998. *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Budiarjo, Miriam, 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
- C. Pirages, Dennis, 1982. *Stabililtas Politik dan Pengelolaan Konflik*, Jakarta : FISIP UI
- Cipto, Bambang, 2000. *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Gafar, Affan, 1991. *Javanese Voters; A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta : Gajahmada University Press
- Geertz, Clifford, 1963. *Old Societies and New States*, New York : Free Pers
- Huntington dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara-negara Berkembang*, alih bahasa Simamora, Jakarta : Rineka Cipta
- H. Turner, 1978. *The Structure of Sociological Theory*, Illioniss : Dorsey Pers,
- Mac Clelland, Charles , 1981. *Ilmu Hubungan Internasional ; Teori dan System*, disunting oleh Hilman Adil, Jakarta : CV. Rajawali
- Mas'oed , Muchtar dan Mac Andrews, 1995. *Perbandingan Sistem Politik* , Yogyakarta : UGM Yogyakarta
- Muhaimin, Yahya dan Collin Mac Andrews, 1995. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Nasikun, 1987. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Muzadi, A. Muchith, 1995. *NU dan FIQH Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM
- Noer, Deliar, 1993. *Ideologi Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan
- Purwantana, 1994. *Partai Politik di Indonesia*, jakarta ; PT. Rineka Cipta

*Penurunan Perolehan Suara PPP pada Pemilu 1999* 79

- Radi, Umaidi, 1983. *Strategi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu*, Jakarta : Pustaka Grafiti
- Sanit, Arbi, 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Seely, R., 1985. *Introduction to Political Science*, dalam F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Bina Cipta
- Siregar, S., (terj.), 1985. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : CV. Rajawali
- Sudarsono, Juwono, 1996. *Perkembangan Ilmu HI dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta : Pustaka Jaya
- Surrachmad, Winarno, 1970. *Dasar dan Tehnik Riset : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV. Transito
- Suryakusuma, Julia I., 1999. *Almanak Parpol Indonesia (API)*, Jakarta ; API

**Anonim :**

- \_\_\_\_\_, 2000. *Memastikan Arah Baru Demokrasi*, Jakarta : Laboratorium Ilmu Politik UI, Seri Penerbitan Studi Politik
- \_\_\_\_\_, 1999. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999*, Surakarta: PT. Pabelan
- \_\_\_\_\_, 1999. *Tiga Undang-Undang Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 1999. *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : KPU,

**Skripsi dan disertasi :**

- R. de Leeuw, Petra, 1997. *Islam Yes, Partai Islam ... ..?, Democracy and Leadership in Cntemporary Indonesian Polititcs*. Disertasi tidak diterbitkan, Belanda : Vrije Universiteit
- Zainal Abidin, 2000. *Konfigurasi Politik Islam Pasca Suharto*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UGM

Surat Kabar :

1. *Republika*, 15 Juni 1998
2. *Republika*, 19 Agustus 1998
3. *Republika*, 15 Maret 1999
4. *Republika*, 13 April 1999
5. *Republika*, 24 Mei 1999
6. *Republika*, 20 September 1999
7. *Republika*, 3 Juli 2000
8. *Media Indonesia*, 5 Januari 1999
9. *Media Indonesia*, 15 Maret 1999
10. *Media Indonesia*, 6 Mei 1999
11. *Kompas*, 29 Agustus 1997
12. *Kompas*, 2 Februari 1998
13. *Kompas*, 3 Juni 1998
14. *Kompas*, 1 Desember 1998
15. *Kompas*, 1 Maret 1999
16. *Tempo*, 21 maret 1987
17. *Tempo*, 2 November 1998
18. *Tempo*, 18 Januari 1999
19. *Tempo*, Edisi Akhir Tahun 2000

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1.

**DEKLARASI  
HASIL RAPAT PRESIDUM, BADAN PEKERJA DAN PIMPINAN  
FRAKSI KELOMPOK PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Keempat Partai Islam : NU, Parmusi, PSII dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam berntuk Konfederasi kelompok Persatuan Pembangunan, dalam rapat Presidium, Badan Pekerja dan Pimpinan fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu Partai Politik yang bernama **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.**

Segala kegiatan yang bukan politik, tetap dikerjakan dan dilaksanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritui/materiil.

Untuk realisasi kesepakatan ini telah dibentuk suatu team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.

Kemudian hasil dari pekerjaan teram dilaporkan kepada Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh musyawarah yang lebih representatif yang insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Pebruari 1973.

Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayah dan inayahNya.

Amin.

Jakarta, 5 Januari 1973

PRESIDIUM KELOMPOK PERSATUAN PEMBANGUNAN

t.t.d.

KH. Dr. Idham Chalid ( NU )

KH. Masykur ( NU )

H. MS. Mintaredja, SH. ( Parmusi )

H. Anwar tjokroaminoto ( PSII )

Rusli Halil ( Perti )<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Umaldi Radi, Loc.Cit. hal

## Lampiran 1

### **PARADIGMA BARU PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) \***

Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik yang selalu berjuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa siap berorientasi ke masa depan dengan paradigma barunya sebagai berikut :

1. Partai yang karena memiliki amanat historis unsur pendirinya (NU, Parmusi, PSII, dan Perti), sehingga terkesan eksklusif menjadi partai yang mampu mendaya gunakan historis keunsuran, lebih terbuka terhadap masuknya elemen-elemen baru, inklusif, dan berorientasi ke masa depan.
2. Visi dan misi Partai yang kurang terumuskan dengan jelas dan tajam, dan ada semacam krisis identitas atau jatidiri menjadi partai yang visi dan misinya (khidmat) terumuskan dan dipahami secara jelas, eksplisit, tajam, dengan identitas dan jatidiri yang jelas.
3. Partai yang tidak berdaya dan tidak mampu berkelit untuk membendung rekayasa pengasas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial politik menjadi partai yang berasas Islam, kembali ke khittah, amar ma'ruf nahi munkar, rahmatan lil-'aalamiin, mengutamakan kepeloporan, dan mandiri.
4. Partai yang mengambang, karena hanya memiliki jaringan kepengurusan organisasi formal sampai ke tingkat kabupaten/kotamadya akibat pemaksaan politik massa mengambang menjadi partai yang memiliki jaringan pengurus organisasi dengan basis massa dengan spektrum yang luas dan beragam sampai ke pelosok pedesaan.
5. Posisi Partai yang merupakan representasi dari ummat yang terpinggirkan, teraniaya, ditinggalkan dan tidak atau kurang diperhitungkan pada masa rezim Orde Baru berkuasa menjadi partai yang merupakan representasi kedaulatan rakyat yang berada pada posisi ummatan wasathan, penengah, moderat, serta diperhitungkan berbagai kekuatan sosial politik.
6. Proses pengambilan keputusan politik Partai yang cenderung elitis, sentralistis, dan agak tertutup menjadi proses pengambilan keputusan

politik Partai yang lebih partisipatif, desentralistis, dan demokratis serta terbuka.

7. Manajemen konflik Partai cenderung dipecahkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terbatas, misalnya hanya melihat asal usul unsur dan kedekatan pribadi dengan pengurus dan/atau pengambil keputusan dengan solusi win-lose solution menjadi manajemen konflik internal Partai lebih dilihat sebagai bagian dari proses dan dinamisasi, dengan lebih memperhatikan berbagai faktor sesuai dengan kadar objektivitas yang tinggi yang solusinya diusahakan bersifat win-win solution, mengutamakan kepentingan yang lebih besar.
8. Pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai yang belum jelas kriteria kinerjanya, bersifat mediocre (pas-pasan, sedang-sedang saja), akibat kaderisasi yang kurang sistematis, hanya terbuka peluang 'satu pintu', yang cenderung menyebabkan persaingan atau konflik yang tidak sehat menjadi pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai berdasarkan prinsip meritokrasi (kemampuan, prestasi politik, militansi, teguh iman, luas wawasan serta menjadikan Islam (Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai pandangan hidup)) dengan kaderisasi yang lebih sistematis, lebih beragam, lebih berdaya saing, dengan kriteria performance yang jelas, terukur, dan teruji.
9. Partai lebih cenderung bersikap kurang responsif dalam konteks pragmatisme politik, kurang menggigit, dan ada 'keharusan' menyesuaikan diri saja dengan arus besar kehendak mayoritas menjadi partai yang lebih mengutamakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan sesuai dengan fatsoen (etika) politik yang akhlakul karimah, dengan tetap memperhatikan kepentingan ummat yang merupakan basis pendukungnya.
10. Partai dan kekuasaan seolah-olah hanya dilihat sebagai tujuan perjuangan saja, dan kadang-kadang kurang memperhatikan bagaimana cara mencapainya menjadi partai dan kekuasaan sebagai instrumen perjuangan nilai-nilai dan kepentingan keummatan, kelslaman, ke-Indonesiaan dimana tujuan dan cara yang etis adalah sama-sama pentingnya.

11. Partai yang kegiatannya terbiasa hanya formal dan normatif dalam mengimplementasikan programnya menjadi partai yang juga proaktif, substantif, dan aplikatif dalam mengimplementasikan programnya.

[www.ppp.co.org](http://www.ppp.co.org)



DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEH ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999

Digital Repository Universitas Jember

NO.	DAERAH TINGKAT / PPD I	PIB (1)		P.KRISNA (2)		PNI (3)		PADJ (4)		P.KAMI (5)		PUI (6)		PKU (7)		PMASYUMI B (8)	
		SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	DAERAH ISTIMEWA ACEH	5.062	0	1.414	0	2.446	0	1.163	0	6.267	0	12.714	0	9.728	0	4.814	0
2.	SUMATERA UTARA	10.963	0	56.450	0	36.814	0	4.868	0	11.946	0	24.650	0	3.179	0	7.224	0
3.	SUMATERA BARAT	6.146	0	2.284	0	4.816	0	2.836	0	20.617	0	20.928	0	2.254	0	11.069	0
4.	RIAU	8.312	0	6.276	0	8.587	0	2.851	0	7.255	0	7.494	0	3.451	0	5.365	0
5.	JAMBI	7.313	0	2.105	0	5.230	0	2.535	0	5.114	0	2.870	0	2.313	0	4.752	0
6.	SUMATERA SELATAN	11.459	0	4.698	0	21.289	0	4.894	0	16.329	0	14.686	0	5.530	0	7.691	0
7.	BENGKULU	2.530	0	1.697	0	7.436	0	1.575	0	3.545	0	1.934	0	2.090	0	3.773	0
8.	LAMPUNG	7.342	0	5.721	0	19.511	0	3.185	0	9.713	0	9.186	0	11.497	0	5.537	0
9.	DKIJAKARTA	5.499	0	10.724	0	4.424	0	2.151	0	7.783	0	7.303	0	4.806	0	3.835	0
10.	JAWA BARAT	38.703	0	25.054	0	55.498	0	19.608	0	48.403	0	75.188	0	52.142	0	29.473	0
11.	JAWA TENGAH	19.371	0	25.901	0	67.898	0	7.451	0	53.334	0	22.841	0	48.850	0	16.831	0
12.	D.I. YOGYAKARTA	4.545	0	3.559	0	8.556	0	1.311	0	15.714	0	3.280	0	5.355	0	2.745	0
13.	JAWA TIMUR	18.820	0	30.989	0	52.696	0	9.261	0	42.697	0	30.255	0	109.033	1	16.370	0
14.	KALIMANTAN BARAT	2.953	0	5.298	0	10.483	0	2.037	0	3.447	0	2.439	0	2.881	0	3.293	0
15.	KALIMANTAN TENGAH	2.029	0	7.315	0	3.661	0	695	0	2.195	0	2.244	0	2.812	0	1.405	0
16.	KALIMANTAN TIMUR	2.943	0	13.731	0	4.576	0	900	0	1.757	0	2.581	0	2.162	0	1.589	0
17.	KALIMANTAN SELATAN	7.255	0	2.233	0	4.336	0	956	0	5.722	0	8.199	0	7.288	0	2.938	0
18.	BALI	690	0	952	0	19.689	0	698	0	873	0	445	0	634	0	493	0
19.	NUSA TENGGARA BARAT	4.837	0	1.500	0	10.260	0	4.372	0	5.899	0	5.441	0	3.840	0	8.192	0
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.469	0	27.884	0	12.096	0	3.330	0	2.020	0	1.054	0	388	0	905	0
21.	TIMOR-TIMUR	644	0	3.376	0	1.776	0	992	0	961	0	331	0	180	0	394	0
22.	SULAWESI SELATAN	10.552	0	16.820	0	3.426	0	2.829	0	8.441	0	5.362	0	15.313	0	4.950	0
23.	SULAWESI TENGAH	3.420	0	22.680	0	1.079	0	398	0	1.421	0	1.561	0	1.329	0	2.302	0
24.	SULAWESI UTARA	2.567	0	61.434	0	4.476	0	770	0	2.457	0	874	0	244	0	502	0
25.	SULAWESI TENGGARA	1.137	0	1.547	0	1.524	0	312	0	2.296	0	1.182	0	1.855	0	706	0
26.	MALUKU	5.486	0	14.339	0	2.011	0	1.799	0	1.740	0	3.544	0	471	0	4.827	0
27.	IRIAN JAYA	733	0	13.766	0	2.334	0	2.064	0	1.531	0	739	0	424	0	444	0
	JUMLAH	192.780	0	369.747	0	376.928	0	85.841	0	289.477	0	269.325	0	300.049	1	152.419	0

DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEH ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999

Lampiran 52

DAERAH TINGKAT / PPD I	D P R - R I															
	PPP (9)		PSII (10)		PDI-P (11)		PAY (12)		PKM (13)		PDKB (14)		PAN (15)		PRD (16)	
	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAERAH ISTIMEWA ACEH	285.014	4	2.288	0	126.038	2	16.607	0	1.598	0	4.285	0	177.069	2	611	0
SUMATERA UTARA	520.121	3	15.566	0	2.052.680	10	6.231	0	3.738	0	134.896	1	465.542	2	2.926	0
SUMATERA BARAT	400.649	3	6.057	0	212.347	2	6.057	0	3.538	0	7.194	0	430.880	3	1.358	0
RIAU	295.924	2	4.328	0	583.583	3	6.060	0	2.806	0	5.244	0	216.688	1	1.269	0
JAMBI	126.621	1	3.846	0	286.042	2	3.532	0	1.836	0	2.021	0	88.721	1	543	0
SUMATERA SELATAN	299.779	2	24.827	0	1.378.668	6	11.637	0	4.490	0	6.259	0	279.104	1	2.648	0
BENGKULU	53.939	1	3.799	0	198.512	1	3.223	0	1.224	0	1.145	0	51.794	1	509	0
LAMPUNG	265.503	1	14.028	0	1.322.032	6	8.201	0	4.659	0	5.360	0	173.491	1	2.483	0
DKIJAKARTA	806.298	3	4.281	0	1.895.964	7	3.337	0	2.411	0	5.539	0	797.766	3	8.274	0
JAWA BARAT	3.513.348	13	105.677	1	7.525.503	27	36.346	0	22.070	0	25.823	0	1.707.252	6	14.995	0
JAWA TENGAH	1.899.390	7	44.453	0	7.380.900	26	28.015	0	13.781	0	30.341	0	1.197.643	4	16.964	0
D.I. YOGYAKARTA	87.865	1	3.383	0	643.202	2	5.575	0	1.807	0	6.938	0	311.619	1	3.429	0
JAWA TIMUR	1.036.862	4	24.540	0	6.703.699	23	33.619	0	14.043	0	26.718	0	940.342	3	13.038	0
KALIMANTAN BARAT	209.792	1	2.466	0	405.543	2	5.899	0	3.536	0	56.699	1	47.374	0	896	0
KALIMANTAN TENGAH	88.824	1	1.223	0	283.564	2	2.357	0	891	0	3.433	0	38.198	0	458	0
KALIMANTAN TIMUR	117.868	1	1.848	0	383.168	3	1.980	0	1.198	0	2.789	0	75.424	1	567	0
KALIMANTAN SELATAN	251.182	2	1.960	0	316.565	2	3.196	0	1.835	0	1.354	0	137.110	1	635	0
BALI	17.632	0	771	0	1.500.050	7	2.039	0	554	0	3.456	0	25.012	0	900	0
NUSA TENGGARA BARAT	198.429	1	18.783	0	231.654	1	7.203	0	4.213	0	6.214	0	71.520	1	1.210	0
NUSA TENGGARA TIMUR	43.100	1	3.770	0	714.312	5	3.717	0	1.517	0	73.551	1	29.270	0	395	0
TIMOR-TIMUR	2.211	0	773	0	119.908	2	2.976	0	1.067	0	1.007	0	9.618	0	423	0
SULAWESI SELATAN	313.903	2	29.022	0	247.112	2	7.762	0	4.730	0	34.130	0	129.712	1	1.374	0
SULAWESI TENGAH	115.140	1	22.768	0	154.185	1	1.817	0	1.270	0	9.771	0	26.710	0	1.234	0
SULAWESI UTARA	122.567	1	28.303	0	364.043	2	1.241	0	3.154	0	19.011	0	34.124	0	747	0
SULAWESI TENGGARA	53.765	1	781	0	109.708	1	2.350	0	1.073	0	929	0	17.747	0	234	0
MALUKU	191.014	1	5.708	0	296.793	2	1.732	0	1.034	0	31.978	1	21.564	0	314	0
IRIAN JAYA	23.647	0	1.162	0	270.843	4	1.173	0	570	0	44.771	1	27.282	1	338	0
JUMLAH	11.340.387	58	376.411	1	35.706.618	153	213.882	0	104.643	0	550.856	5	7.528.576	34	78.774	0

**DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEH ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999**

NO.	DAERAH TINGKAT I/ PPD I	D P R - R I															
		PSII-1905 (17)		PKD (18)		P.PILAR (19)		PARI (20)		PPIIM (21)		PBB (22)		PSD (23)		PK (24)	
		SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	DAERAH ISTIMEWA ACEH	1,520	0	306	0	346	0	627	0	9,149	0	30,628	1	509	0	16,251	0
2.	SUMATERA UTARA	4,891	0	56,242	0	6,084	0	5,842	0	28,987	0	78,556	1	3,306	0	43,674	0
3.	SUMATERA BARAT	4,368	0	903	0	774	0	2,198	0	33,023	0	115,678	1	1,283	0	56,020	0
4.	RIAU	2,319	0	2,195	0	546	0	1,715	0	13,162	0	49,495	0	1,018	0	26,496	0
5.	JAMBI	1,438	0	474	0	690	0	1,562	0	10,457	0	27,141	0	956	0	9,773	0
6.	SUMATERA SELATAN	6,456	0	3,094	0	8,269	0	3,380	0	26,247	0	103,389	1	2,944	0	54,501	0
7.	BENGKULU	1,423	0	347	0	434	0	500	0	5,396	0	12,473	0	375	0	17,173	0
8.	LAMPUNG	6,439	0	4,298	0	1,139	0	2,049	0	18,385	0	31,185	0	2,359	0	61,882	0
9.	DKI JAKARTA	3,841	0	5,141	0	916	0	1,438	0	9,258	0	95,265	1	993	0	231,545	0
10.	JAWA BARAT	68,536	0	8,654	0	6,162	0	9,536	0	95,501	1	806,293	3	8,987	0	537,897	0
11.	JAWA TENGAH	11,191	0	12,380	0	2,682	0	6,512	0	54,868	0	154,628	1	6,500	0	133,886	0
12.	D.I. YOGYAKARTA	1,545	0	3,883	0	504	0	1,416	0	9,784	0	27,027	0	1,305	0	27,808	0
13.	JAWA TIMUR	9,801	0	6,848	0	3,151	0	6,555	0	53,885	0	175,516	1	5,707	0	84,517	0
14.	KALIMANTAN BARAT	2,185	0	9,993	0	1,197	0	2,148	0	9,653	0	23,327	0	858	0	10,250	0
15.	KALIMANTAN TENGAH	655	0	606	0	168	0	468	0	3,619	0	13,167	0	341	0	2,407	0
16.	KALIMANTAN TIMUR	2,508	0	1,055	0	774	0	365	0	3,803	0	28,913	0	406	0	19,433	0
17.	KALIMANTAN SELATAN	2,079	0	402	0	1,473	0	928	0	11,009	0	60,344	1	969	0	17,732	0
18.	BALI	331	0	381	0	251	0	414	0	3,547	0	4,247	0	239	0	1,753	0
19.	NUSA TENGGARA BARAT	5,520	0	603	0	433	0	1,256	0	22,260	0	66,571	1	1,776	0	17,498	0
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	856	0	26,439	0	333	0	490	0	2,559	0	8,118	0	422	0	2,837	0
21.	TIMOR-TIMUR	271	0	1,842	0	139	0	426	0	1,619	0	1,078	0	76	0	133	0
22.	SULAWESI SELATAN	7,832	0	9,945	0	2,960	0	2,015	0	12,957	0	52,099	1	2,889	0	24,539	0
23.	SULAWESI TENGAH	3,122	0	3,585	0	139	0	389	0	4,340	0	20,464	0	269	0	6,003	0
24.	SULAWESI UTARA	2,257	0	19,741	0	548	0	204	0	1,874	0	10,984	0	783	0	4,029	0
25.	SULAWESI TENGGARA	401	0	280	0	114	0	1,573	0	3,507	0	29,183	0	534	0	5,496	0
26.	MALUKU	741	0	11,054	0	109	0	422	0	6,696	0	19,649	0	1,963	0	21,224	0
27.	IRIAN JAYA	308	0	26,072	1	173	0	249	0	1,205	0	4,621	0	1,804	0	2,908	1
	JUMLAH	152,834	0	216,663	1	40,508	0	54,677	0	456,750	1	2,050,039	13	49,571	0	436,670	1

**DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEH ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999**

NO.	DAERAH TINGKAT I/ PPD I	D P R - R I															
		PNU (25)		PNI-FM (26)		P.IPKI (27)		PR (28)		PII (29)		PNI-MM (30)		P.MURBA (31)		PDI (32)	
		SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	DAERAH ISTIMEWA ACEH	21,131	1	1,781	0	1,364	0	2,705	0	1,367	0	1,854	0	727	0	8,007	0
2.	SUMATERA UTARA	19,179	0	26,317	0	13,958	0	18,199	0	2,357	0	19,925	0	4,533	0	39,846	0
3.	SUMATERA BARAT	5,083	0	2,560	0	8,514	0	6,016	0	971	0	2,357	0	2,566	0	9,418	0
4.	RIAU	27,950	0	6,136	0	6,234	0	2,825	0	4,537	0	4,831	0	830	0	15,022	0
5.	JAMBI	8,442	0	5,790	0	4,636	0	3,605	0	696	0	3,831	0	1,220	0	8,248	0
6.	SUMATERA SELATAN	25,940	0	19,416	0	13,448	0	7,942	0	5,276	0	20,930	0	2,462	0	34,021	0
7.	BENGKULU	5,793	0	3,386	0	2,765	0	4,296	0	1,895	0	3,990	0	416	0	7,538	0
8.	LAMPUNG	64,346	1	19,840	0	11,385	0	5,417	0	2,986	0	24,307	0	2,594	0	21,278	0
9.	DKI JAKARTA	20,573	0	4,459	0	4,210	0	3,655	0	1,376	0	3,454	0	2,342	0	16,583	0
10.	JAWA BARAT	152,641	1	62,615	0	51,558	0	36,310	0	11,718	0	60,231	0	9,217	0	79,169	0
11.	JAWA TENGAH	59,355	0	82,332	1	42,169	0	18,544	0	7,052	0	85,345	1	6,995	0	57,512	0
12.	D.I. YOGYAKARTA	4,572	0	14,050	0	10,704	0	2,733	0	1,176	0	7,200	0	1,173	0	5,554	0
13.	JAWA TIMUR	103,587	1	59,697	0	42,534	0	14,248	0	9,287	0	59,580	0	10,107	0	48,749	0
14.	KALIMANTAN BARAT	11,172	0	7,422	0	9,255	0	6,138	0	588	0	6,509	0	621	0	131,909	1
15.	KALIMANTAN TENGAH	13,346	0	2,726	0	2,680	0	1,111	0	587	0	4,977	0	994	0	8,037	0
16.	KALIMANTAN TIMUR	6,847	0	2,160	0	2,064	0	1,581	0	290	0	2,122	0	794	0	8,734	0
17.	KALIMANTAN SELATAN	64,286	1	3,007	0	4,645	0	2,879	0	1,232	0	3,205	0	1,616	0	9,798	0
18.	BALI	1,622	0	7,631	0	4,071	0	17,535	0	380	0	7,673	0	260	0	5,966	0
19.	NUSA TENGGARA BARAT	34,375	0	9,922	0	13,541	0	5,275	0	1,536	0	7,803	0	642	0	21,666	0
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,776	0	11,688	0	14,546	0	5,516	0	388	0	5,162	0	1,319	0	27,026	0
21.	TIMOR-TIMUR	227	0	1,520	0	1,568	0	377	0	259	0	1,785	0	169	0	11,309	0
22.	SULAWESI SELATAN	10,970	0	3,335	0	47,485	1	16,650	0	3,637	0	2,135	0	2,714	0	9,546	0
23.	SULAWESI TENGAH	4,362	0	2,185	0	2,362	0	58,223	0	427	0	1,453	0	733	0	6,981	0
24.	SULAWESI UTARA	5,146	0	1,852	0	4,657	0	3,582	0	248	0	1,614	0	1,156	0	13,776	0
25.	SULAWESI TENGGARA	5,496	0	3,742	0	846	0	3,952	0	2,951	0	458	0	748	0	162	0
26.	MALUKU	868	0	1,242	0	2,222	0	8,733	0	1,980	0	1,136	0	136	0	13,605	0
27.	IRIAN JAYA	1,843	0	1,258	0	1,923	0	4,119	0	1,991	0	1,508	0	5,601	0	27,992	1
	JUMLAH	680,928	5	368,096	1	325,334	1	262,166	0	65,396	0	345,375	1	62,685	0	647,452	2

DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEHI ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999

Digital Repository Universitas Jember

NO.	DAERAH TINGKAT I/ PPD I	D P R - R I															
		P.GOLKAR (33)		PP (34)		PKB (35)		PUDI (36)		PBN (37)		P.MKGR (38)		PDR (39)		PCD (40)	
		SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	DAERAH ISTIMEWA ACEH	154.373	2	13.928	0	11.750	0	7.346	0	1.433	0	2.107	0	8.040	0	4.125	0
2.	SUMATERA UTARA	1.128.529	5	20.726	0	57.242	1	6.684	0	15.352	0	7.972	0	16.095	0	32.147	0
3.	SUMATERA BARAT	459.528	4	17.200	0	17.083	0	4.167	0	4.209	0	6.264	0	10.660	0	3.709	0
4.	RIAU	632.609	3	15.831	0	62.851	1	2.595	0	3.364	0	8.783	0	14.058	0	6.691	0
5.	JAMBI	400.495	2	16.136	0	55.024	0	1.163	0	3.308	0	3.720	0	4.614	0	1.218	0
6.	SUMATERA SELATAN	781.517	4	22.386	0	174.352	1	8.892	0	6.243	0	8.924	0	9.700	0	5.354	0
7.	BENGKULU	190.731	1	4.614	0	24.128	0	3.431	0	1.520	0	3.613	0	3.532	0	681	0
8.	LAMPUNG	636.570	3	12.343	0	386.364	2	5.518	0	3.716	0	6.966	0	18.586	0	3.350	0
9.	DKI JAKARTA	541.346	2	85.795	0	174.661	1	10.602	0	2.175	0	3.274	0	5.434	0	5.402	0
10.	JAWA BARAT	5.439.334	20	157.133	1	1.622.124	6	28.325	0	13.177	0	43.367	0	68.530	0	24.495	0
11.	JAWA TENGAH	2.300.625	8	58.796	0	2.953.511	10	15.816	0	13.966	0	20.349	0	27.457	0	14.787	0
12.	D.I. YOGYAKARTA	258.745	1	6.204	0	257.240	1	1.700	0	3.219	0	5.089	0	3.317	0	3.048	0
13.	JAWA TIMUR	2.510.025	9	42.068	0	7.034.707	24	15.678	0	13.314	0	23.519	0	63.611	0	31.710	0
14.	KALIMANTAN BARAT	511.513	3	15.534	0	47.098	0	4.380	0	1.944	0	3.770	0	3.152	0	1.647	0
15.	KALIMANTAN TENGAH	221.940	2	7.163	0	47.501	1	1.674	0	1.732	0	4.960	0	2.136	0	1.238	0
16.	KALIMANTAN TIMUR	336.629	2	11.337	0	56.086	0	1.971	0	1.532	0	3.305	0	4.984	0	3.072	0
17.	KALIMANTAN SELATAN	357.278	3	15.760	0	131.050	1	1.495	0	1.197	0	4.557	0	2.664	0	1.849	0
18.	BALI	196.984	1	1.682	0	32.253	1	716	0	688	0	1.100	0	2.943	0	1.321	0
19.	NUSA TENGGARA BARAT	735.733	4	10.796	0	52.094	0	5.815	0	2.697	0	10.000	0	52.684	1	12.275	0
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	759.156	6	2.412	0	7.147	0	760	0	4.514	0	5.306	0	3.139	0	400	0
21.	TIMOR-TIMUR	168.592	2	578	0	629	0	248	0	2.380	0	440	0	1.452	0	348	0
22.	SULAWESI SELATAN	2.481.914	16	22.702	0	58.876	1	4.821	0	3.796	0	12.414	0	35.893	0	4.685	0
23.	SULAWESI TENGAH	585.955	3	6.330	0	17.727	0	2.093	0	627	0	3.553	0	8.879	0	3.271	0
24.	SULAWESI UTARA	811.899	4	5.773	0	13.152	0	928	0	891	0	5.414	0	27.779	0	340	0
25.	SULAWESI TENGGARA	505.345	3	3.576	0	15.365	0	840	0	533	0	2.709	0	4.141	0	155	0
26.	MALUKU	326.115	2	11.957	0	11.879	0	2.117	0	845	0	2.030	0	12.000	0	334	0
27.	IRIAN JAYA	308.632	5	2.133	0	15.069	0	1.203	0	3.249	0	698	0	12.386	0	323	0
	JUMLAH	23.742.112	120	590.895	1	13.336.963	51	140.978	0	111.621	0	204.203	0	427.875	1	167.975	0



Mak UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR JUMLAH SUARA DAN WAKIL YANG DIPEROLEHI ORGANISASI PESERTA PEMILU  
UNTUK KEANGGOTAAN DPR-RI SELURUH INDONESIA TAHUN 1999

DAERAH TINGKAT I/ PPD I	D P R - R I															
	PKP (41)		P.SPSI (42)		PNBI (43)		PBI (44)		P.SUNI (45)		PND (46)		PUMI (47)		PPI (48)	
	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL	SUARA	WAKIL
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAERAH ISTIMEWA ACEH	19.651	0	692	0	721	0	1.771	0	2.642	0	329	0	1.088	0	3.236	0
SUMATERA UTARA	80.996	1	3.836	0	3.402	0	47.511	0	1.549	0	8.920	0	999	0	6.338	0
SUMATERA BARAT	23.118	0	1.132	0	2.821	0	979	0	1.051	0	578	0	676	0	646	0
RIAU	16.427	0	990	0	3.636	0	23.672	0	1.211	0	1.480	0	840	0	1.877	0
JAMBI	16.904	0	860	0	2.027	0	1.376	0	10.726	0	1.240	0	682	0	1.294	0
SUMATERA SELATAN	44.190	0	2.966	0	6.214	0	13.935	0	5.972	0	1.577	0	1.577	0	6.054	0
BENGKULU	13.106	0	417	0	1.641	0	2.088	0	1.479	0	1.533	0	392	0	944	0
LAMPUNG	38.188	0	2.451	0	5.305	0	6.236	0	6.454	0	3.200	0	1.034	0	1.693	0
DKI JAKARTA	45.004	0	1.358	0	1.741	0	34.746	0	1.095	0	1.915	0	1.524	0	1.933	0
JAWA BARAT	242.755	1	9.263	0	27.133	0	34.223	0	20.352	0	16.708	0	8.859	0	11.123	0
JAWA TENGAH	97.576	1	8.431	0	21.559	0	15.858	0	36.070	0	18.045	0	4.361	0	8.789	0
D.I. YOGYAKARTA	15.867	0	1.611	0	5.953	0	1.383	0	4.025	0	2.167	0	927	0	4.280	0
JAWA TIMUR	151.747	1	8.729	0	25.566	0	30.673	0	59.063	0	18.453	0	5.311	0	7.738	0
KALIMANTAN BARAT	17.870	0	2.363	0	5.798	0	121.590	0	1.645	0	3.442	0	484	0	1.315	0
KALIMANTAN TENGAH	7.745	0	695	0	970	0	1.432	0	886	0	959	0	663	0	197	0
KALIMANTAN TIMUR	12.507	0	762	0	981	0	2.831	0	470	0	975	0	222	0	620	0
KALIMANTAN SELATAN	15.034	0	902	0	1.927	0	2.411	0	5.784	0	2.560	0	2.698	0	493	0
BALI	23.962	0	791	0	1.327	0	1.277	0	321	0	1.516	0	194	0	401	0
NUSA TENGGARA BARAT	20.934	0	4.325	0	9.488	0	4.056	0	14.499	0	2.288	0	10.831	0	1.580	0
NUSA TENGGARA TIMUR	39.340	0	499	0	4.278	0	1.476	0	248	0	1.477	0	360	0	369	0
TIMOR-TIMUR	724	0	211	0	428	0	366	0	158	0	188	0	85	0	192	0
SULAWESI SELATAN	4.685	0	30.364	0	4.593	0	7.906	0	3.947	0	714	0	3.017	0	1.268	0
SULAWESI TENGAH	10.039	0	337	0	2.359	0	1.426	0	232	0	191	0	370	0	406	0
SULAWESI UTARA	50.778	0	1.003	0	1.343	0	1.766	0	105	0	219	0	158	0	415	0
SULAWESI TENGGARA	4.776	0	409	0	1.568	0	645	0	212	0	673	0	1.015	0	400	0
MALUKU	19.954	0	994	0	1.121	0	1.008	0	1.748	0	983	0	1.362	0	187	0
IRIAN JAYA	6.254	0	481	0	1.844	0	801	0	215	0	261	0	122	0	143	0
JUMLAH	1.040.131	4	86.872	0	145.744	0	363.802	1	180.170	0	96.986	0	49.851	0	63.931	0